



BPSDM Prov. Kaltim

2025 LAPORAN Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LKJIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, sekaligus sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, serta memuat informasi mengenai capaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Dalam penyusunan laporan ini telah diupayakan penyajian data dan informasi yang objektif, terukur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, disadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga LKJIP ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Timur.

**KEPALA BPSDM
PROV. KALTIM**



Dra. Nina Dewi., M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19660928 198609 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 sebagai bentuk upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi kepemimpinan menjelang terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2029.

Sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra 2024–2026, Tahun 2025 difokuskan pada penguatan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan strategi berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur diarahkan untuk tetap mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024–2026, sekaligus memastikan stabilitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mengangkat isu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yaitu “Membangun Kaltim Untuk Nusantara”. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur masuk pada Tujuan 4 yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi” dan Sasaran 11 yaitu “Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK”. Secara Umum capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dapat dinyatakan “sangat baik”.

Keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 didukung oleh komitmen kuat pimpinan dan seluruh pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi secara terarah dan terintegrasi sesuai

Renstra 2024–2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja menjadi faktor penting dalam memastikan ketercapaian target secara efektif dan akuntabel. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur dengan indikator kinerja “Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi”. Dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian kinerja sebesar 129,85% dan realisasi anggaran sebesar 91,74%.
2. Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan capaian kinerja sebesar 87,04 dan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja” dengan capaian kinerja 70,25 sehingga realisasi anggaran dari sasaran ini sebesar 98,26%.

Rata-rata capaian indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mencapai 95,71% dengan seluruh target sasaran berhasil dicapai dalam kategori “sangat baik” dan realisasi anggaran BPSDM Prov. Kaltim mencapai 95,68%. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan akuntabel, serta menjadi dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.2.1 Sekretariat	5
1.2.2 Bidang Serifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	8
1.2.3 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	10
1.2.4 Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional....	12
1.3 Struktur Organisasi	14
1.4 Sumber Daya Manusia	15
1.5 Aspek Strategis Organisasi	17
1.6 Aspek Strategis Organisasi	20
1.7 Sarana dan Prasarana Kerja	26
1.8 Akreditasi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur	30
1.9 Penjamin Mutu Pengembangan Kompetensi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur	35
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
2.1 Perencanaan Strategis	37
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	41
2.3 Perjanjian Kinerja	41
2.4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025	42
2.5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	44
3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	45
3.1.2 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP	45

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	47
3.3 Analisis Capaian Kinerja	49
3.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	49
BAB IV PENUTUP	101
4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja BPSDM Prov. Kaltim	101
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja Dimasa Yang Akan Datang	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.....	14
Gambar 1.2 Persentase Jumlah ASN di BPSDM Prov. Kaltim.....	15
Gambar 1.3 Persentase Gender PPPK.....	15
Gambar 1.4 Persentase Gender PNS.....	15
Gambar 1.5 Jenjang Pendidikan PNS.....	16
Gambar 1.6 Jenjang Pendidikan PPPK.....	16
Gambar 1.7 Golongan PNS.....	16
Gambar 1.8 Golongan PPPK.....	17
Gambar 1.9 Akreditasi Bintang “1” BPSDM Provinsi Kalimantan Timur...	31
Gambar 1.10 Akreditasi “A” LPPBJ BPSDM Provinsi Kalimantan Timur..	31
Gambar 1.11 Sertifikat Akreditasi “A” PKA BPSDM Provinsi Kaltim.....	32
Gambar 1.12 Sertifikat Akreditasi “A” PKP dan Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kaltim.....	33
Gambar 1.13 Sertifikat Akreditasi “B” PDMB BPSDM Provinsi Kaltim	34
Gambar 1.14 Sertifikat Akreditasi “A” PTPEKT BPSDM Provinsi Kaltim..	34
Gambar 1.15 Sertifikat Akreditasi “A” Pengelolaan Arsip Dinamis BPSDM Provinsi Kaltim.....	35
Gambar 1.16 Penjamin Mutu Pengembangan Kompetensi BPSDM Provinsi Kaltim.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Uraian Pelayanan BPSDM Prov. Kaltim berdasarkan Metode Pembelajaran 10 : 20 : 70	19
Tabel 1.2 Tabel Isu-Isu Strategis	21
Tabel 1.3 Kapasitas Ruang Belajar Gedung A BPSDM Prov. Kaltim	27
Tabel 1.4 Kapasitas Ruang Belajar Gedung B BPSDM Prov. Kaltim	27
Tabel 1.5 Alat Bantu Pembelajaran Ruang Belajar BPSDM Prov. Kaltim	27
Tabel 1.6 Asrama dan Fasilitasnya BPSDM Prov. Kaltim	28
Tabel 1.7 Kendaraan Operasional BPSDM Prov. Kaltim	29
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis BPSDM Prov. Kaltim	38
Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur	39
Tabel 2.3 Matriks Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan / Sasaran BPSDM Provinsi Kalimantan Timur	40
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2025.....	41
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2025.....	42
Tabel 2.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025.....	43
Tabel 2.7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BPSDM Prov. Kaltim	43
Tabel 3.1 Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP.....	44
Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2024	45
Tabel 3.3 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Kaltim Terhadap Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP BPSDM Prov. Kaltim.....	46
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	47
Tabel 3.5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	49
Tabel 3.6 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025	50
Tabel 3.7 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPD BPSDM Prov. Kaltim.....	52
Tabel 3.8 Sasaran Strategis I - Jumlah ASN Yang Telah Memiliki Sertifikasi Kompetensi dan / atau STTP	53
Tabel 3.9 Target dan Realisasi SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi/STTP Pengembangan Kompetensi Tahun 2025	54
Tabel 3.10 Data Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2025	55
Tabel 3.11 Data Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Tahun 2025	63
Tabel 3.12 Data Sertifikasi/ Uji Kompetensi Tahun 2025	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (e) yang menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran strategis dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Peran tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi manajerial, teknis, fungsional, dan pemerintahan, serta penguatan tata kelola pengembangan sumber daya manusia aparatur yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dapat ditingkatkan. Pencapaian kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dapat diukur secara sistematis dan

disajikan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

Informasi kinerja yang disajikan melalui penerapan SAKIP tersebut dapat dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan, sekaligus untuk mendukung terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya, informasi kinerja yang dihasilkan melalui penerapan SAKIP dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur, sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan landasan hukum yang ditetapkan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023.

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 881, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi teknis;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- j. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai uraian tugas antara lain :

- a. merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kompetensi teknis;
- f. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- g. melaksanakan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelola kelembagaan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

Adapun rincian/penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1.2.1 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas antara lain :

- a. menghimpun perencanaan program kegiatan badan dan menyusun perencanaan program sekretariat pada badan sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
- g. sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.

1.2.1.1 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Subbagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas antara lain :

- a. menghimpun perencanaan program kegiatan badan dan menyusun perencanaan program Subbagian Perencanaan Program pada badan sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan pengumpulan perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan, pengelolaan asset dan pelaporan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

1.2.1.2 Sub Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Umum mempunyai uraian tugas antara lain :

- a. merencanakan kegiatan Subbagian umum berdasarkan rencana operasional/program kerja bidang sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian umum agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum, kehumasan dan pengaduan masyarakat serta pelaporan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.2.2 Bidang Serifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Bidang Serifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Serifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Serifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sertifikasi kompetensi;

- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi dan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai uraian tugas antara lain :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan berdasarkan program kerja badan pengembangan sumber daya manusia serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sertifikasi kompetensi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.

1.2.3 Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengembangan kompetensi teknis.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan kompetensi teknis;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan kompetensi teknis;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat Daerah penunjang;

- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengembangan kompetensi teknis;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi serta pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah penunjang; dan
- h. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai uraian tugas antara lain :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pengembangan kompetensi teknis berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi umum dan pilihan Jabatan Administrasi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah penunjang;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.

1.2.4 Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan prajabatan;
- f. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan Daerah dan jabatan,

- pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional dan pengembangan kompetensi kepemimpinan prajabatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunyai uraian tugas antara lain :

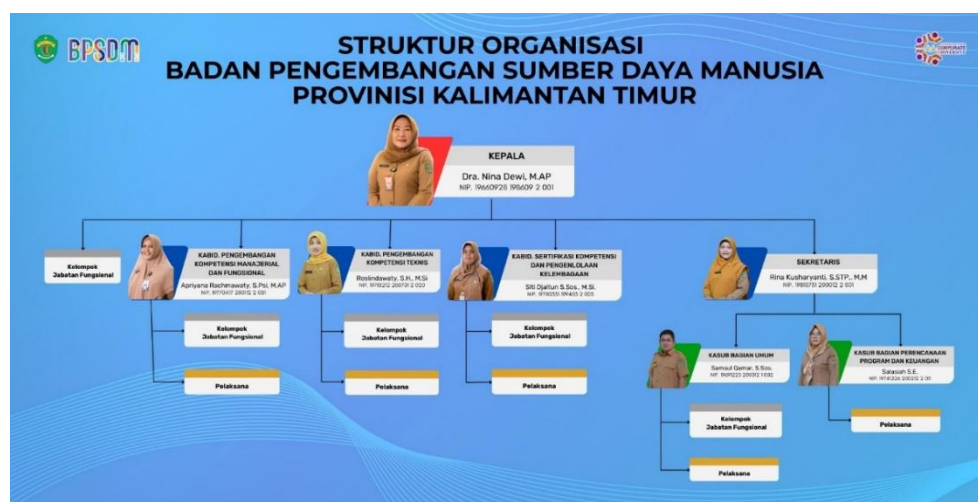
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional berdasarkan program kerja badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja badan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan baik lisan maupun tertulis.

1.3 Struktur Organisasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur mempunyai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

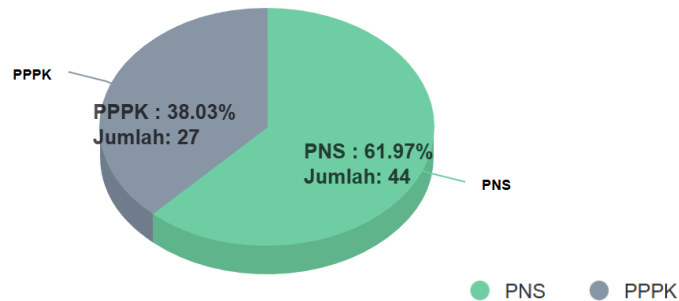


Sumber Data : Struktur Organisasi BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2025

1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data 2025, jumlah ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebanyak 71 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 44 orang dan PPPK sebanyak 27 orang.

Gambar 1.2 Persentase Jumlah ASN di BPSDM Prov. Kaltim

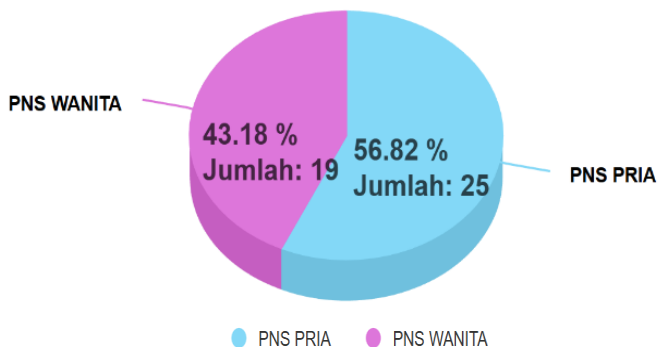


Sumber Data : Berdasarkan Aplikasi SIMASN

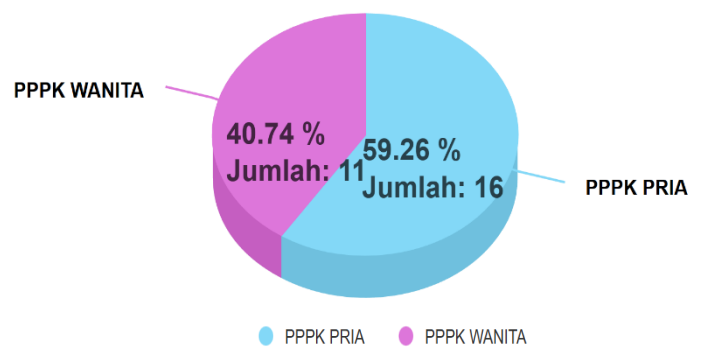
Adapun rekapitulasi ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2025 sebagai berikut :

1. DATA ASN (PNS DAN PPPK) BERDASARKAN GENDER DILINGKUNGAN BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Gambar 1.4 Persentase Gender PNS



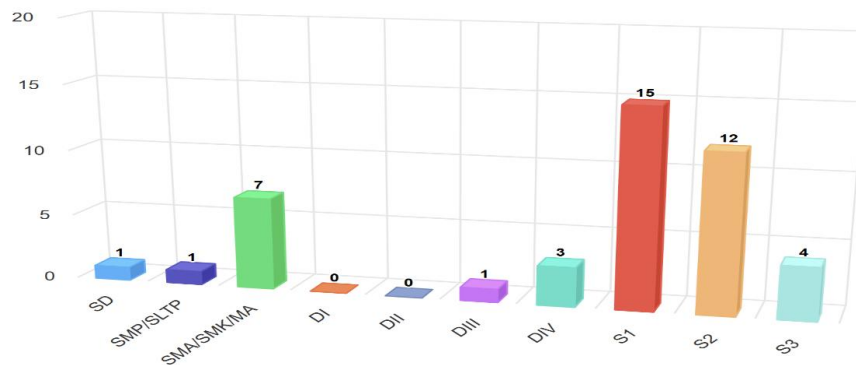
Gambar 1.3 Persentase Gender PPPK



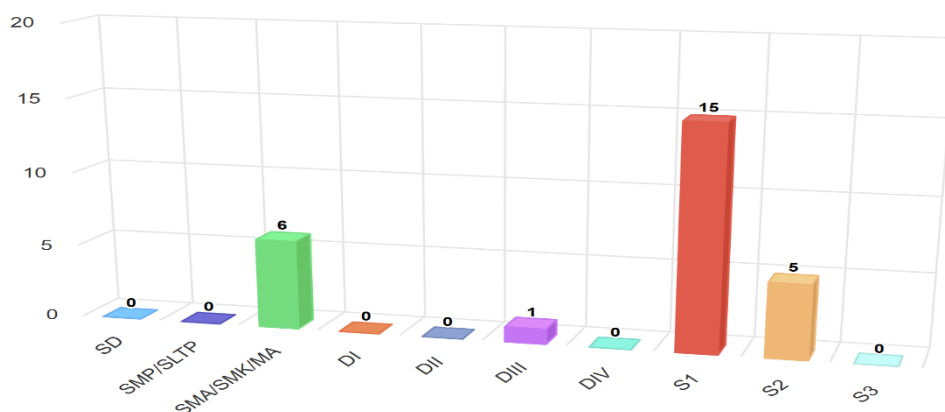
Sumber Data : Berdasarkan Aplikasi SIMASN

2. DATA ASN (PNS DAN PPPK) BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN DILINGKUNGAN BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Gambar 1.5 Jenjang Pendidikan PNS



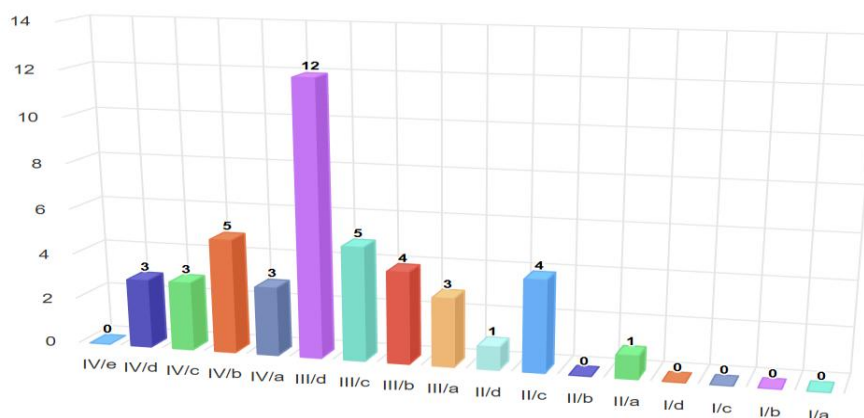
Gambar 1.6 Jenjang Pendidikan PPPK



Sumber Data : Berdasarkan Aplikasi SIMASN

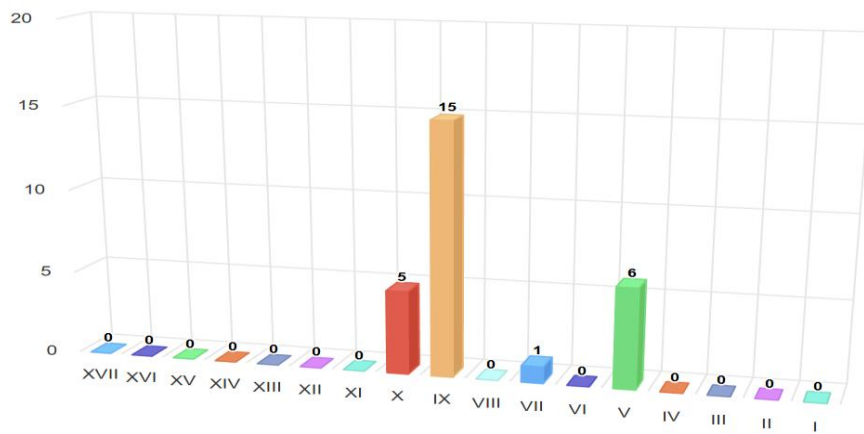
3. DATA ASN (PNS DAN PPPK) BERDASARKAN GOLONGAN DILINGKUNGAN BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Gambar 1.7 Golongan PNS



Sumber : Data berdasarkan Aplikasi SIMASN

Gambar 1.8 Golongan PPPK



Sumber Data : Berdasarkan Aplikasi SIMASN

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan kinerja organisasi. Perencanaan kebutuhan pegawai, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi, harus disesuaikan dengan tuntutan tugas dan fungsi organisasi. Komposisi pegawai BPSDM Provinsi Kalimantan Timur yang mayoritas berlatar belakang pendidikan sarjana dan diploma menjadi potensi strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan dukungan aparatur yang profesional, kompeten, dan produktif, pencapaian target kinerja dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

1.5 Aspek Strategis Organisasi

Kebutuhan akan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Provinsi Kalimantan Timur menuntut aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Untuk menjawab tuntutan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terencana dan sesuai kebutuhan organisasi, BPSDM berupaya meningkatkan kapasitas aparatur sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang optimal.

Corporate University merupakan konsep pembelajaran organisasi yang terintegrasi untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia. Dalam konteks pemerintahan, ASN Corporate University menjadi sarana strategis pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan secara tematik dan berbasis isu strategis, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta tenaga ahli. Transformasi organisasi menuju Corporate University ditandai dengan peran sebagai pusat pengembangan kompetensi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, selaras dengan kebijakan nasional, serta memperkuat internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK.

Dalam penerapan Kalimantan Timur Corporate University, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menggunakan konsep metode pembelajaran 10 : 20 : 70 yaitu :

- a. Metode Pembelajaran 10% (sepuluh persen) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan klasikal di dalam kelas dan belajar mandiri;
- b. Metode Pembelajaran 20% (dua puluh persen) kegiatan pembelajaran berupa pelatihan nonklasikal dalam bentuk bimbingan; dan
- c. Metode Pembelajaran 70% (tujuh puluh persen) berupa pelatihan nonklasikal bersifat terintegrasi atau praktek di tempat kerja.

Penerapan metode pembelajaran 10 : 20 : 70 tersebut diuraikan dalam Pelayanan BPSDM berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Uraian Pelayanan BPSDM Prov. Kaltim berdasarkan Metode Pembelajaran 10 : 20 : 70

No	Metode Pengembangan	Pelaksana	Jenis Pelayanan
1	10 % - Pembelajaran Formal	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II 2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 4. Pelatihan Dasar CPNS 5. Orientasi PPPK 6. Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama 7. Pelatihan Pranata Humas 8. Orientasi DPRD 9. Pelatihan Lurah dan Camat 10. Pelatihan Manajerial dan Fungsional Lainnya yang dilaksanakan secara Klasikal
		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Pelatihan Pelayanan Prima 2. Pelatihan Bendaharawan 3. Pelatihan Pelayanan Publik 4. Pelatihan Dasar Manajemen Bencana 5. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Level 1 6. Pelatihan Okupasi PPK 7. Pelatihan Dasar Kepariwisata 8. Pelatihan Kearsipan 9. Pelatihan Teknis Lainnya yang dilaksanakan secara Klasikal / Blended Learning
2	20 % - Pembelajaran Sosial	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. <i>Capacity Building</i> 2. Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>) 3. Patok banding (<i>benchmarking</i>) 4. Pelatihan Jarak Jauh 5. <i>e-learning</i> 6. Webinar Pemerintahan Dalam Daerah / Jabatan Pimpinan Tinggi 7. Rapat Koordinasi Manajerial dan Fungsional
		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	1. <i>Capacity Building dan outbond</i> 2. Patok banding (<i>benchmarking</i>) 3. Pelatihan Jarak Jauh 4. Sosialisasi dan Workshop 5. Uji Kompetensi PBJ Level 1 6. Uji Kompetensi Okupasi PPK–PBJ Level 2

No	Metode Pengembangan	Pelaksana	Jenis Pelayanan
		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	1. Uji Kompetensi JPT 2. Uji Kompetensi Administrator 3. Uji Kompetensi Pengawas 4. Uji Kompetensi Lurah 5. Uji Kompetensi Camat 6. Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja 7. Uji Kompetensi Bendahara, PPTK, KPA 8. <i>Capacity Building</i> 9. Coaching 10. <i>Mentoring</i> 11. Komunitas belajar (<i>community of practices</i>) / webinar / berbagi pengetahuan (<i>knowledge sharing</i>) / sesi berbagi (<i>sharing session</i>) 12. Patok banding (<i>benchmarking</i>) 13. Focus Group Discussion 14. Rapat Kerja Teknis 15. Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk non klasikal lainnya.
		Sekretariat	1. Rapat Koordinasi BPSDM 2. Rapat Koordinasi Nasional / Rapat Koordinasi Lainnya 3. Capacity Building untuk Internal BPSDM 4. Sosialisasi / Workshop untuk Internal BPSDM 5. Pembelajaran alam terbuka (<i>outbond</i>) untuk Internal BPSDM 6. Patok banding (<i>benchmarking</i>) untuk Internal BPSDM
3	70 % - Pembelajaran dengan Pengalaman Langsung	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	1. Detasering (<i>secondment</i>) 2. Pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah 3. Magang/praktik kerja 4. On The Job Training 5. Project

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Isu strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan agenda nasional reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur. Pada tingkat regional, posisi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut tersedianya ASN yang unggul dan kompeten. Secara kewilayahan, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, BPSDM Provinsi

Kalimantan Timur berfokus pada pemantapan pengembangan kompetensi ASN sebagai mitra strategis IKN dalam mewujudkan SDM aparatur yang profesional menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 1.2 Tabel Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis			
Isu Nasional	Isu Regional	Isu Kewilayahan	Isu Strategis BPSDM Prov. Kaltim
Reformasi birokrasi dan peningkatan SDM aparatur	Tuntutan SDM unggul di Kaltim sebagai daerah penyangga IKN	Perlunya peningkatan kapasitas ASN untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	BPSDM Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan SDM/Aparatur yang kompeten menuju Indonesia emas tahun 2045.
			Pemantapan Pengembangan Kapasitas SDM / Aparatur Pemerintah Daerah Sebagai Mitra IKN

Berdasarkan kondisi tersebut, arah strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur difokuskan pada optimalisasi penerapan konsep Corporate University dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan sistem pembelajaran yang terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan, sehingga proses pengembangan SDM/aparatur lebih relevan dengan kebutuhan organisasi, terukur hasilnya, serta mampu meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.

Untuk mendapatkan rencana strategis dalam penyelesaian permasalahan strategis diatas, maka dilakukan pengukuran kondisi dan situasi organisasi dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunities dan Threats), sebagai berikut :

a. Analisis SWOT - Faktor Internal

1. Strength (S)

- 1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 menetapkan Tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Telah tersedia beberapa Aplikasi pelatihan seperti SIMPEL, LMS BPSDM, dll yang memiliki fungsi masing masing;
- 3) BPSDM Prov. Kaltim memiliki SDM Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan beraneka ragam keahlian dan kompetensi;
- 4) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama dengan beberapa Narasumber diluar BPSDM Prov.Kaltim;
- 5) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama yang baik dengan Instansi Pembina Pengembangan dan Kompetensi SDM Aparatur (LAN RI, BPSDM Kemendagri, dll);
- 6) BPSDM Prov.Kaltim telah menjalin kerjasama pelatihan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama pelatihan dengan Seluruh BKPSDM pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama pelatihan dengan beberapa instansi vertikal antara lain PPSDM Ketenagakerjaan dan PPSDM Kominfo;
- 9) BPSDM Prov. Kaltim telah menjalin kerjasama pelatihan dengan Swasta yaitu PPM Manajemen dalam perancangan pelatihan dan pengelolaan Corporate University.
- 10) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2023 menetapkan BPSDM Prov. Kaltim sebagai ketua Kalimantan Timur Corporate University dan mendukung pengelolaan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

2. Weaknesses (W)

- 1) Semua aplikasi pelatihan yang berada di BPSDM Prov.Kaltim masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi satu sama lain;
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia ASN yang kompeten untuk membangun, mengelola dan mengembangkan Desain Pembelajaran dalam Pengembangan Kompetensi di BPSDM Provinsi Kaltim;
- 3) Proses pembelajaran yang masih mengarah ke training, sehingga belum terdapat pelatihan yang bisa diakses kapan saja sesuai kebutuhan ASN;
- 4) Belum terdapat pengelolaan pengetahuan dari setiap ASN yang dapat diakses oleh ASN lainnya;
- 5) BPSDM Prov.Kaltim baru dapat menjangkau 10-30 % dari populasi ASN Pemprov Kaltim dalam peningkatan kompetensi setiap tahunnya;
- 6) BPSDM Prov.Kaltim belum memiliki sistem yang lengkap yang mampu mengintegrasikan komponen, stakeholder dan sumber daya pendukung lainnya yang dapat membantu peningkatan Kompetensi ASN Aparatur di Provinsi Kaltim melalui pengelolaan pengetahuan yang terintegrasi yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja;
- 7) BPSDM Prov.Kaltim belum pernah melakukan survey terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kebutuhan kompetensi pegawainya yang sejalan dengan kebutuhan organisasi;
- 8) BPSDM Prov.Kaltim belum memiliki data keseluruhan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya untuk melaksanakan peningkatan kompetensi Aparatur;
- 9) BPSDM Prov.Kaltim masih memiliki pengetahuan yang minimal untuk membuat kerangka pengelolaan pengetahuan yang terintegrasi;

- 10) BPSDM Prov.Kaltim belum memiliki kerjasama dengan penyedia fasilitas pelatihan diluar pemerintahan yang dapat turut serta membantu peningkatan kompetensi ASN di Kalimantan Timur.

b. Analisis SWOT - Faktor Eksternal

1. Opportunities (O)

- 1) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur merupakan penanggung jawab untuk peningkatan kompetensi ASN di seluruh Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pelanggannya jelas seluruh ASN di Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Mandatori perundang-undangan kewajiban peningkatan kompetensi minimal 20 JP bagi PNS dan maksimal 24 JP bagi PPPK;
- 3) Mendapat dukungan penuh dari Perangkat Daerah di seluruh Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Lembaga pelatihan di luar pemerintahan memberikan peluang untuk bekerjasama peningkatan kompetensi Aparatur dengan BPSDM Prov.Kaltim;
- 5) K/L dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia membuka pintu untuk studi tiru bagi BPSDM Prov .Kaltim.

2. Threats (T)

- 1) Pencapaian Mandatori perundang undangan peningkatan kompetensi minimal 20 JP bagi PNS dan maksimal 24 JP bagi PPPK belum tercapai di semua ASN maupun Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Peningkatan kompetensi SDM Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur yang belum sejalan dengan rencana strategis organisasi;
- 3) Pengetahuan di Organisasi banyak dan beragam, namun tersebar dan melekat pada satu orang, sehingga terjadi ketergantungan terhadap individu dan berdampak pada kinerja Perangkat Daerah yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

- 4) Belum tercipta Organisasi pembelajar yang berfokus pada “learning” yang mendorong pembelajaran adaptif maupun generative agar bukan hanya dapat melakukan penyesuaian terhadap lingkungan, tetapi juga untuk “belajar” secara berkesinambungan demi penciptaan inovasi agar terjadi peningkatan kinerja;
- 5) Peran BPSDM Prov.Kaltim sebagai lembaga penyelenggara pelatihan bagi Aparatur lambat laun akan tertinggal dan diambil alih pihak lain;
- 6) Belum tercipta budaya (Habitiasi) pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui proses pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan secara terus menerus di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada kinerja Aparatur.

Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi, serta pengkajian strategis antara lain:

a. Strategi Penguatan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Berbasis Corporate University :

1. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi secara berkala pada seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan keselarasan antara pengembangan kompetensi dan rencana strategis organisasi.
2. Mengembangkan sistem pembelajaran terintegrasi melalui optimalisasi dan integrasi seluruh aplikasi pelatihan (SIMPEL dan sistem lainnya).
3. Menyusun desain pembelajaran berbasis blended learning dan pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

b. Strategi Penguatan Sinergi dan Kemitraan Pengembangan Kompetensi ASN

1. Memperkuat sinergi dengan LAN RI, BPSDM Kemendagri, instansi vertikal, serta lembaga pelatihan pemerintah dan swasta dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran.

2. Meningkatkan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten/Kota dan seluruh Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN.
 3. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pelatihan eksternal untuk memperluas akses dan kualitas pembelajaran.
 4. Mengoptimalkan peran BPSDM sebagai Ketua Kalimantan Timur Corporate University dalam mengintegrasikan sistem pembelajaran di lingkungan Pemprov Kaltim.
- c. Strategi Penguatan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kompetensi
1. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome untuk mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja ASN dan organisasi.
 2. Melakukan pengendalian capaian mandatori 20 JP bagi PNS dan 24 JP bagi PPPK secara terukur dan berkala.
- d. Strategi Penguatan Pengkajian dan Pengembangan Organisasi Pembelajar
1. Mengkaji kebutuhan penguatan kapasitas SDM internal BPSDM, khususnya dalam desain pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan.
 2. Mengembangkan model organisasi pembelajar yang mendorong budaya berbagi pengetahuan dan inovasi berkelanjutan.
 3. Menyusun kebijakan dan pedoman implementasi Corporate University secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1.7 Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang terselenggaranya Pengembangan SDM di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, saat ini telah tersedia fasilitas-fasilitas pendukung diantaranya adalah:

1. Ruang Belajar, dilengkapi dengan peralatan penunjangnya (berupa alat bantu pembelajaran) sejumlah 14 (empat belas) ruang dan mampu menampung peserta diklat sebanyak $\pm$ 560 (lima ratus

enam puluh) orang. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Kapasitas Ruang Belajar Gedung A BPSDM Prov. Kaltim

No.	Nama Ruang	Luasan	Kapasitas Maksimal
1	A.1.1	8x8 m	40 Orang
2	A.1.2	8x8 m	40 Orang
3	A.1.3	8x8 m	40 Orang
4	A.2.1	8x8 m	40 Orang
5	A.2.2	8x8 m	40 Orang
6	A.2.3	8x8 m	40 Orang
7	A.3	8x8 m	40 Orang
Jumlah			280 Orang

Tabel 1.4 Kapasitas Ruang Belajar Gedung B BPSDM Prov. Kaltim

No.	Nama Ruang	Luasan	Kapasitas Maksimal
1	B.1.1	8x8 m	40 Orang
2	B.1.2	8x8 m	40 Orang
3	B.1.3	8x8 m	40 Orang
4	B.2.1	8x8 m	40 Orang
5	B.2.2	8x8 m	40 Orang
6	B.2.3	8x8 m	40 Orang
7	B.3	8x8 m	40 Orang
Jumlah			280 Orang

Tabel 1.5 Alat Bantu Pembelajaran Ruang Belajar BPSDM Prov. Kaltim

No	Jenis Alat	Jumlah (Unit)
1	Papan Tulis (White Board)	1
2	Projector	1
3	LCD	1
4	Wireless	1
5	Sound System	1
6	Interactive Television	1

- Perpustakaan, dengan koleksi buku berjumlah 1.703 buah judul buku, yang dikelola sistem inventarisasinya dengan menggunakan komputer dan manual. Koleksi buku tersebut belum termasuk Laporan Proyek Perubahan (Kertas Kerja) alumni Diklat PIM IV dan III, serta Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS. Perpustakaan

BPSDM Prov. Kaltim telah mendapatkan Akreditasi dari Badan Perpustakaan Nasional.

3. Laboratorium Komputer dan Bahasa, yang berkapasitas 80 unit komputer berbasis LAN dan Wi-fi.
4. Asrama sebanyak 4 (empat) Gedung, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya pada tabel 8.

Tabel 1.6 Asrama dan Fasilitasnya BPSDM Prov. Kaltim

No.	Nama Asrama	Kamar	Tabung Apar	Kapasitas	Fasilitas
1	A	25	6	75 Tempat Tidur	AC, TV & tabung pemadam perantai, serta ruang rehat pada setiap lantai dan dilengkapi Mesin Pemanas Air
2	B	25	6	75 Tempat Tidur	AC, TV & tabung pemadam perantai, serta ruang rehat pada setiap lantai dan dilengkapi Mesin Pemanas Air
3	C	25	6	50 Tempat Tidur	AC, TV & tabung pemadam perantai, serta ruang rehat pada setiap lantai dan dilengkapi Mesin Pemanas Air
4	D	25	6	50 Tempat Tidur	AC, TV & tabung pemadam perantai, serta ruang rehat pada setiap lantai dan dilengkapi Mesin Pemanas Air
Jumlah		100	24	250 Tempat Tidur	

5. Ruang (bangunan) untuk keperluan pelayanan administratif dan penunjang kegiatan lainnya serta dilengkapi dengan fasilitas yang tersedia antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) 1 unit gedung administrasi;
- 2) 4 unit gedung asrama;
- 3) 2 unit gedung kelas/belajar;
- 4) 1 unit aula besar;
- 5) 1 unit aula kecil;
- 6) 1 unit gedung perpustakaan;
- 7) 1 unit gedung lab. bahasa;

- 8) 1 unit lab. komputer;
- 9) 1 unit gedung poli klinik;
- 10) 1 unit ruang mini studio;
- 11) 1 unit komplek guest house dan sport centre;
- 12) 1 unit masjid
- 13) 1 unit gedung kantin
- 14) 1 unit gedung koperasi (mini market);
- 15) 6 unit rumah dinas;
- 16) 1 unit tempat laundry;
- 17) 4 unit pos keamanan;
- 18) Pagar pengaman keliling kantor;
- 19) 1 unit gedung genset;
- 20) 1 unit mesin genset;
- 21) Tempat parkir kendaraan roda 4 dan roda 2;
- 22) 24 Unit pompa air;
- 23) 1 Unit Ruang Mini Theater;
- 24) 1 Unit Ruang PPID dan Lounge;
- 25) 1 Unit Ruang Makan 2 lantai;
- 26) Fasilitas olah raga, meliputi:
 - a) Gedung Fitnes Center;
 - b) Lapangan Futsal;
 - c) Lapangan Basket;
 - d) Tenis Meja.
 - e) Billiard
 - f) Lapangan Volly;
 - g) Sarana Outbond Army Game.

6. Kendaraan Operasional, berupa roda 4 maupun roda 2. Rincian kendaraan operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Kendaraan Operasional BPSDM Prov. Kaltim

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)
Kendaraan Roda 4		15
1	Kijang Inova Reborn Venturer	1
2	Kijang Inova Putih	1
3	Kijang Inova Hitam	1
4	Toyota Kijang Pick-Up	1
5	Toyota Soluna	1
6	Mini Bus (30 seat)	2
7	Toyooa Avanza Veloz Putih	1
8	Toyota Avanza Silver	3
9	Toyota Hilux	1
10	Toyota Rush	3
Kendaraan Roda 2		2
1	Honda Kharisma	1
2	Honda Supra X 125	2

1.8 Akreditasi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

BPSDM Provinsi Kalimantan Timur telah menerima 6 kali uji kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP). 2 Akreditasi bersifat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan 4 Akreditasi Program Pelatihan.

1. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) merupakan satu satunya instansi yang memiliki hak untuk memberikan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan di Indonesia. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah penilaian kelayakan terhadap Lembaga Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LAN RI, akreditasi ini dilaksanakan terhadap Lembaga penyelenggara pelatihan yang akan menyelenggarakan pelatihan Struktural, Pelatihan Sosio Kultural dan/atau Pelatihan Dasar CPNS. Kategori penilaian akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan sebagai berikut :

a. Berstatus Terakreditasi :

- > 91.00 s.d 100 – Bintang 2 (Masa berlaku 5 Tahun);
- ≥ 81.00 s.d < 90.99 – Bintang 1 (Masa berlaku 5 Tahun),
Masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 81,00;

b. Berstatus Tidak Terakreditasi : Jika tidak masuk kriteria diatas

- 1) Berdasarkan kriteria tersebut maka melalui Keputusan Kepala LAN RI Nomor 488/K.1/PDP.09/2022 dan Sertifikat Akreditasi LAN RI Nomor 750/K.1/PDP.09 tanggal 7 September 2022, BPSDM Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi dengan Kategori Bintang 1 (satu) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Gambar 1.9 Akreditasi Bintang “1” BPSDM Provinsi Kalimantan Timur



- 2) Keputusan Kepala LKPP Nomor 286 Tahun 2024 dan Sertifikat Akreditasi LKPP Nomor 000086/AKR.LPPBJ/PPSDMPBJ/24 tanggal 26 November 2024, BPSDM Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dengan Kategori Akreditasi “A” dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Gambar 1.10 Akreditasi “A” LPPBJ BPSDM Provinsi Kalimantan Timur



2. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan

Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap program Pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LAN RI, LKPP, BNPB dan Kementerian Pariwisata sesuai dengan tugas fungsinya. Kategori Penilaian Akreditasi Program Pelatihan sebagai berikut :

a. Terakreditasi : ≥ 71.00

- A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d 100 (Masa berlaku 5 Tahun)
- B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d 90,99; (Masa berlaku 3 Tahun)
- C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d 80,99 (Masa berlaku 2 Tahun)
- Masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 71,00

b. Tidak Terakreditasi : < 71

- 1) Keputusan Kepala LAN RI Nomor 347/K.1/PDP.09/2021 dan Sertifikat Akreditasi LAN RI Nomor 1404/K.1/PDP.09 tanggal 4 Agustus 2021, LAN RI menetapkan Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori Akreditasi "A" dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Gambar 1.11 Sertifikat Akreditasi "A" PKA BPSDM Provinsi Kaltim



- 2) Keputusan Kepala LAN RI Nomor 487/K.1/PDP.09/2022 dan Sertifikat Akreditasi LAN RI Nomor 749/K.1/PDP.09 tanggal 7 September 2022, LAN RI menetapkan Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori Akreditasi “A” dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- 3) Keputusan Kepala LAN RI Nomor 487/K.1/PDP.09/2022 dan Sertifikat Akreditasi LAN RI Nomor 749/K.1/PDP.09 tanggal 7 September 2022, LAN RI menetapkan Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori Akreditasi “A” dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Gambar 1.12 Sertifikat Akreditasi “A” PKP dan Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kaltim



- 4) Keputusan Sekretaris Utama BNPB Nomor 98 Tahun 2023 dan Sertifikat Akreditasi BNPB Nomor 06/BNPB/SU/DL.06.01/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, BNPB menetapkan Program Pelatihan Dasar Manajemen Bencana BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dengan kategori Akreditasi B dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Gambar 1.13 Sertifikat Akreditasi “B” PDMB BPSDM Provinsi Kaltim



- 5) Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor SK/3/SD.00.01/S/2024 dan Sertifikat Nomor SRTF/3/SD.00.01/S/2024 tanggal 12 Desember tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terakreditasi dengan Kategori A dan masa berlaku 5(lima) tahun.

Gambar 1.14 Sertifikat Akreditasi “A” PTPEKT BPSDM Provinsi Kaltim



- 6) Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : AK.02.00/315/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Teknis Kearsipan Terakreditasi dengan Kategori A (Sangat Baik) dan masa berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan 10 Desember 2030.

Gambar 1.15 Sertifikat Akreditasi “A” Pengelolaan Arsip Dinamis BPSDM Provinsi Kaltim



1.9 Penjamin Mutu Pengembangan Kompetensi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

Melalui Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Kepala BPSDM, BPSDM Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 orang Penjamin Mutu yang berasal dari Eksternal BPSDM dengan tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDM Prov Kaltim yaitu :

1. **Drs. H. Bere Ali, M.Si**; dan
2. Drs. Syarifuddin Pernyata

Gambar 1.16 Penjamin Mutu Pengembangan Kompetensi BPSDM Provinsi Kaltim



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026. Dalam pelaksanaannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menyelaraskan program dan kegiatannya dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut. Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat diukur dari sejauh mana hasil pelaksanaan tugas tersebut memberikan manfaat dan kontribusi nyata. Apabila seluruh target dan indikator kinerja dapat dicapai secara optimal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, serta secara tidak langsung berkontribusi terhadap terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tujuan 4	→	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik
Sasaran 11	→	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia dan program

penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfokus pada peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan langkah-langkah strategis yang dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis BPSDM Prov. Kaltim

Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatnya Kompetensi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur
	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur

Sumber Data : Renstra BPSDM Prov. Kaltim 2024-2026

Dalam perencanaan strategis, perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur. BPSDM Provinsi Kalimantan Timur berperan dalam menyiapkan aparatur yang kompeten dan profesional guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Tujuan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja serta program/kegiatan yang terukur sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke –		
			1	2	3
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	86	87	88
2	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	86	86,5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Prov. Kaltim	70,01	73	74

Adapun rencana Program dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.3 Matriks Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan / Sasaran BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Presentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis
				2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2) Persentase SDM/ Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/ Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional
					3) Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi
2	Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Prov. Kaltim	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase Realisasi Anggaran
				3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah
				4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4. Persentase Capaian Retribusi Daerah
				5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5. Persentase SDM aparatur yang memiliki sttp / sertifikat kompetensi
				6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	6. Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik
				7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah
				8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8. Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu
				9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9. Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan berfungsi baik

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang bersifat spesifik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menilai masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak dalam menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program, atau kegiatan. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026, pada Tahun 2025 ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah ASN yang menerima Sertifikasi Kompetensi dan atau STTP}}{\text{Total target ASN yang akan mengikuti pengembangan kompetensi}} \times 100$	BPSDM Prov. Kaltim	Sekretariat dan Seluruh Bidang di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur
2	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dihitung berdasarkan rata-rata nilai persepsi responden terhadap unsur pelayanan yang dinilai dengan skala 1 sampai 4. Nilai rata-rata tiap unsur dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah unsur pelayanan, kemudian dikonversi dengan mengalikan 25 sehingga diperoleh nilai SKM dalam skala 25–100. Nilai tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori mutu pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.	SKM Semester I dan II	Sekretariat dan Seluruh Bidang di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur
		Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Prov. Kaltim	Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	LKJIP	

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian target kinerja, adapun perjanjian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Presentase SDM/ASN yang telah memiliki Sertifikasi dan atau STTP Pengembangan Kompetensi	Persen	88
2.	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Prov. Kaltim	Nilai	73

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp27.830.776.402,-	APBD Murni + APBD-P
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp42.467.404.383,-	
	Jumlah	Rp70.298.180.785,-	

2.4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Anggaran Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang bersumber dari dana APBD dan APBD-P Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 sebesar Rp70.298.180.785,- yang terdiri dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp27.830.776.402,- dengan realisasi Rp25.531.278.692,- (91,74%) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp42.467.404.383,- dengan realisasi Rp41.726.882.420,- (98,26%),-. Total realisasi sampai dengan akhir Desember sebesar Rp67.258.161.112,- (95,68%).

Tabel 2.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi		Naik /Turun
Alokasi Belanja Tahun 2024	Rp63.040.712.315,-	Rp59.505.185.587,-	94,39%	
Alokasi Belanja Tahun 2025	Rp70.298.180.785,-	Rp67.258.161.112,-	95,68%	↑1,29

Sumber Data : Anggaran BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2024 dan Tahun 2025

2.5 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Tahun 2025 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BPSDM Prov. Kaltim

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Persentase	Keterangan
1.	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Rp27.830.776.402,-	39%	Di Tunjang melalui kegiatan : – Pengembangan Kompetensi Teknis – Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2.	Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi	Rp42.467.404.383,-	61%	Di Tunjang melalui kegiatan : - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dituangkan melalui gambaran umum implementasi hasil evaluasi SAKIP dalam bentuk nilai, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP

No	Nilai Capaian	Predikat Penilaian	Keterangan
1	0 s/d 30	D	Sangat Kurang
2	> 30 s/d 50	C	Kurang
3	> 50 s/d 60	CC	Cukup
4	> 60 s/d 70	B	Baik
5	> 70 s/d 80	BB	Sangat Baik
6	> 80 s/d 90	A	Memuaskan
7	> 90 s/d 100	AA	Sangat Memuaskan

3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berikut adalah hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot 2023 (%)	Bobot 2024 (%)	AKIP BPSDM			Peningkatan /Penurunan Capaian 2023 - 2024
				2022	2023	2024	
1	Perencanaan Kinerja	30%	30%	22,20	22,20	22,80	↑ 0,60
2	Pengukuran Kinerja	20%	30%	13,80	14,20	19,50	↑ 5,30
3	Pelaporan Kinerja	10%	15%	6,30	6,30	10,20	↑ 3,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	25%	7,60	14,80	17,75	↑ 2,95
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja	20%		14,00	15,20	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100%	100%	63,90	72,70	70,25	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				B	BB	BB	

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspeltorat tahun 2025

3.1.2 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Evaluasi implementasi SAKIP pada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur mendapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti dan segera melakukan rencana aksi dalam melaksanakan perbaikan dimasa yang akan datang. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Kaltim sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Kaltim Terhadap Laporan Hasil Evaluasi Sistem AKIP BPSDM Prov. Kaltim

No	Aspek	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Strategi/ Rencana Aksi
1.	<u>Perencanaan Kinerja</u>	Dalam penetapan target selain parameter harus terukur, relevan dengan sasaran, juga agar memperhatikan hasil capaian tahun sebelumnya sebagai baseline dalam menentukan target.	1. Mengevaluasi Capaian Tahun sebelumnya 2. Mengumpulkan dan menganalisis data realisasi indikator kerja tahun sebelumnya
2.	<u>Pengukuran Kinerja</u>	Dalam melakukan pengukuran kinerja agar menyempurnakan penyusunan renaksi dan monitoring pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara berkala dengan menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi permasalahan sebelumnya terkait penyesuaian anggaran, aktivitas, kebijakan dan strategis, maupun efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	1. Melakukan Rapat Evaluasi minimal dua kali dalam 1 Bulan 2. Mengidentifikasi kegiatan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. 3. Tertib dalam pengisian E-SAKIP
3.	<u>Pelaporan Kinerja</u>	1. Dokumen Laporan Kinerja agar menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/ nasional/ internasional (Benchmark Kinerja); 2. Informasi dalam laporan kinerja agar dimanfaatkan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;	1. Melaksanakan Benchmarking ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka Penguatan Corpu 2. Informasi dalam laporan kinerja berkala agar dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
4.	<u>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</u>	1. Melengkapi hasil monitoring dan evaluasi kinerja dengan realisasi anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan kinerja untuk memastikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja 2. Hasil pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memuat permasalahan dan rekomendasi serta tindak lanjut secara berkesinambungan sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dalam perbaikan (rekomendasi) dan peningkatan kinerja.	1. Melengkapi hasil monitoring dan evaluasi kinerja dengan realisasi anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan kinerja untuk memastikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; 2. Hasil pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memuat permasalahan dan rekomendasi serta tindak lanjut secara berkesinambungan sehingga dapat memberikan dampak yang nyata dalam perbaikan (rekomendasi) dan peningkatan kinerja.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Sistem Merit merupakan fondasi utama dalam manajemen ASN yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Melalui delapan komponennya, Sistem Merit memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Salah satu komponen penting dalam Sistem Merit adalah pengembangan karier, yang menuntut agar setiap ASN memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi secara adil dan terencana sebagai dasar peningkatan kapasitas dan jenjang kariernya.

Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Profesionalisme ASN, khususnya pada aspek kompetensi, menjadi salah satu indikator strategis dalam mendukung penerapan Sistem Merit pada manajemen ASN. Indikator ini berperan penting dalam mendorong pelaksanaan pengembangan karier ASN melalui peningkatan kompetensi, kepemilikan sertifikasi dan/atau STTP, serta kesesuaian antara kompetensi ASN dengan jabatan yang diduduki. Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan kontribusi BPSDM dalam memperkuat komponen pengembangan karier sebagai bagian dari implementasi Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pengukuran Capaian kinerja pada BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2025 disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target dan realisasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja		Persentase Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi/ STTP Pengembangan Kompetensi	Persentase	88	I	20	22,74	129,85	147,56
					II	20	37,88		
					III	24	44,20		
					IV	24	25,03		
2	Meningkatnya		Indeks	86,5	I	0	0	87,04	100,62

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja (%)
	Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat			II	0	0	
					III	0	0	
					IV	86,5	87,04	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	73	I	0	0	70,25
					II	0	0	
					III	73	70,25	
					IV	0	0	
								96,23

Pada Tabel 3.4 Indikator Persentase SDM/ASN yang telah memiliki Sertifikasi dan/atau STTP digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan pengembangan kompetensi ASN sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme aparatur. Target indikator pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 88%, yang mencerminkan komitmen BPSDM dalam memastikan sebagian besar ASN telah mengikuti pengembangan kompetensi yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi dan/atau STTP.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, realisasi indikator mencapai 129,85%, dengan tingkat capaian sebesar 147,56% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja tahun 2025 tidak hanya tercapai, tetapi terlampaui secara signifikan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi ASN yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh BPSDM Prov. Kaltim.

Pengukuran capaian kinerja BPSDM Prov. Kaltim, secara umum berhasil tercapai sesuai dengan target, bahkan capaian kinerja melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Oleh karena itu BPSDM Provinsi Kalimantan Timur kedepannya harus terus menganalisis dan mengevaluasi agar dapat meningkatkan lagi kinerja yang telah diraih pada tahun ini.

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Pada akhir tahun 2025 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan dituangkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan diimplementasikan melalui Rencana Aksi dalam menjalankan program dan kegiatan, adapun seluruh gambaran pengukuran capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

3.3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah direncana sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	Persen	88	129,85	147,56
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,5	87,04	100,62
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	73	70,25	96,23

Capaian kinerja indikator Persentase SDM/ASN yang telah memiliki Sertifikasi dan/atau STTP menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN telah berjalan secara efektif. Realisasi tahun 2025 sebesar 129,85% melampaui target 88%, yang mengindikasikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan mampu menjangkau ASN secara luas dan menghasilkan output berupa sertifikasi dan/atau STTP.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang terencana, pemanfaatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK), serta optimalisasi berbagai metode pembelajaran, baik klasikal maupun nonklasikal. Selain itu, dukungan sistem pencatatan melalui aplikasi SIMPEL BPSDM turut berkontribusi terhadap ketepatan pengukuran capaian indikator.

3.3.1.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur pada periode berjalan tetap mengacu pada Renstra BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga terdapat perbedaan indikator dan target dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 :

Tabel 3.6 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Ket
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase SDM/ASN yang telah memiliki Sertifikasi dan atau STTP	Persentase	87	88	134	129,85	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	86,5	86,07	87,04	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,01	73	72,70	70,25	

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025, terdapat beberapa dinamika capaian pada masing-masing indikator kinerja, antara lain :

- a. Pada indikator Persentase SDM/ASN yang telah memiliki Sertifikasi dan/atau STTP, realisasi Tahun 2025 sebesar 129,85% mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 134%. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja, melainkan karena target yang ditetapkan pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, target SDM/ASN yang memiliki Sertifikasi dan/atau STTP ditetapkan sebanyak 8.773 orang, sedangkan target pada Tahun 2025 meningkat secara signifikan menjadi 28.564 orang dengan realisasi sebanyak 37.089 orang. Peningkatan target ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi perjalanan dinas dan belanja lainnya, di mana anggaran hasil efisiensi dialihkan untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi (mandatory spending). Dengan demikian, jumlah SDM/ASN yang ditargetkan memiliki Sertifikasi dan/atau STTP menjadi lebih besar dari tahun sebelumnya.
- b. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, realisasi Tahun 2025 sebesar 87,04 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 86,07. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
- c. Sementara itu, pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, realisasi Tahun 2025 sebesar 70,25 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 72,70. Penurunan ini terjadi karena adanya perubahan pada komponen penilaian, di mana salah satu komponen yang sebelumnya dinilai, yaitu capaian akuntabilitas kinerja, dihapuskan. Perubahan mekanisme penilaian tersebut berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh pada Tahun 2025.

Secara umum, perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur tetap berada pada kategori baik, dengan adanya penyesuaian target dan mekanisme penilaian yang memengaruhi dinamika capaian masing-masing indikator.

3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaian telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra			Realisasi		Proyeksi	Ket
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Presentase SDM/ASN yang telah memiliki Sertifikasi dan atau STTP	Persentase	87	88	89	134	129,85	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	86,5	88	86,07	87,04	88	
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,01	73	74	72,70	70,25	74	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 menunjukkan rata-rata capaian sebesar 100%. Capaian tersebut menjadi bahan reviu dan evaluasi bagi BPSDM dalam melakukan penyesuaian kebijakan serta sebagai acuan dalam menetapkan target dan strategi pencapaian pada tahun berikutnya sesuai dengan arah kebijakan dalam RENSTRA.

3.3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain :

a. Sasaran Strategis I

Berikut analisis Sasaran Strategi I “Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur” dengan indikator kinerja” Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi.

Tabel 3.8 Tabel Target dan Realisasi Sasaran Strategis I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	Persentase	88	129,85	147,56

Kepala BPSDM Provinsi Kaltim menerbitkan kebijakan untuk menggunakan Aplikasi Sistem Manajemen Pelatihan (SIMPEL) dalam penyelenggaraan pelatihan. SIMPEL yaitu aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). SIMPEL berfungsi sebagai sarana administrasi dan monitoring pelatihan, mulai dari pendaftaran peserta, pengelolaan jadwal, data peserta, hingga pelaporan hasil pelatihan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi/STTP Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1	ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Orang	3.500	3.602
2	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	280	108
3	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	24.784	33.379
TOTAL			28.564	37.089

Berdasarkan data pada SIMPEL Tahun 2025, jumlah SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi/STTP Pengembangan Kompetensi tercatat sebanyak 37.089 orang, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 28.564 orang. Target tersebut sebelumnya direncanakan sebanyak 10.430 orang, namun mengalami penyesuaian seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025. Anggaran hasil efisiensi tersebut kemudian dialokasikan kembali untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi, sehingga target penerima Sertifikasi/STTP dapat ditingkatkan secara signifikan.

Untuk mengukur keberhasilan pada sasaran strategis I terdapat kinerja antara lain :

1. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Bidang pengembangan Kompetensi Teknis menyelenggarakan berbagai bentuk pengembangan kompetensi, seperti pelatihan teknis, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi kompetensi, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut data pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis :

Tabel 3.10 Data Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2025

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support Kelas Fasilitas Rumah Sakit RSUD Abdoel Wahab Sjahanie. provinsi Kalimantan Timur Angkatan IV	Pelatihan	30	PKT	Teknis	25
2	Pelatihan Bahasa Inggris Bagi ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	28
3	Pelatihan Bahasa Inggris Kelas Fasilitas Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
4	Bimtek "Public Speaking And Effective Communication Skill" Bagi Tenaga Pendidik di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman	Bimtek	30	PKT	Teknis	32
5	Bimtek Penyelamatan Korban Kecelakaan Air Bagi Relawan Damkar Kecamatan Samboja	Bimtek	50	PKT	Teknis	52
6	Bimbingan Teknis Mechanical Engineering bagi ASN Biro Umum Setda Prov. Kaltim	Bimtek	40	PKT	Teknis	28
7	Pelatihan Bahasa Inggris Bagi ASN Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	27
8	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Kelas Fasilitas Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
9	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support Kelas Fasilitas Rumah Sakit RSUD Abdoel Wahab Sjahanie. provinsi Kalimantan Timur Angkatan III	Pelatihan	25	PKT	Teknis	25
10	Pelatihan Public Speaking And Effective Communication Skill Kelas Fasilitas Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
11	Bimbingan Teknis Konseling Lanjutan Bagi Tenaga Penyedia Layanan PPA Di Lingkungan UPTD PPA Dan Dinas Pengampu Urusan PPPA Se- Kalimantan Timur	Bimtek	30	PKT	Teknis	27
12	Pelatihan Keprotokolan Kelas Fasilitas Badan Penelitian dan	Pelatihan	30	PKT	Teknis	24

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
	Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur					
13	Pelatihan Pariwisata Dasar Berbasis Kompetensi	Pelatihan	40	PKT	Teknis	24
14	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support Kelas Fasilitas Rumah Sakit RSUD Abdoel Wahab Sjahanie. provinsi Kalimantan Timur Angkatan II	Pelatihan	30	PKT	Teknis	25
15	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Kelas Fasilitas Kota Balikpapan	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
16	Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Kelas Fasilitas Kota Samarinda	Pelatihan	30	PKT	Teknis	27
17	Bimbingan Teknis Etika Layanan, Jamuan dan Tata Boga Pemerintahan Bagi ASN di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Bimtek	50	PKT	Teknis	40
18	Pelatihan Public Speking And Effective Communication Skill Kelas Fasilitas Dinas Pariwisata dan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
19	Pelatihan Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
20	Pelatihan Public Speaking And Effective Communication Skill Kelas Fasilitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.	Pelatihan	40	PKT	Teknis	40
21	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Kelas Fasilitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	28
22	Bimbingan Teknis Konseling Dasar Bagi Tenaga Penyedia Layanan Di Lingkungan UPTD PPD & Dinas Pengampu Urusan PPA Se-Kalimantan Timur	Bimtek	30	PKT	Teknis	27
23	Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bimtek	400	PKT	Teknis	397

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
24	Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bimtek	50	PKT	Teknis	8
25	Pelatihan Pengadaan Barang Jasa Level-1 Angkatan 3 Kelas Fasilitasi Kabupaten Paser	Pelatihan	30	PKT	Teknis	28
26	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level - 1 Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
27	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Kelas Fasilitasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	28
28	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Kelas Fasilitasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	22
29	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Kelas Fasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
30	In House Training Public Speaking and Effective Communication Skills kelas BPSPDM Prov Kaltim Batch 2	Bimtek	20	PKT	Teknis	18
31	In-House Training Public Speaking and Effective Communication Skills kelas BPSPDM Prov Kaltim Batch 1	Bimtek	20	PKT	Teknis	17
32	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Kelas Fasilitasi BPBD Prov. Kaltim	Pelatihan	30	PKT	Teknis	31
33	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Kelas Fasilitasi Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
34	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Kelas Fasilitasi Biro Umum	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
35	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Kelas Fasilitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	28
36	Pelatihan Kapasitas Unit Kearsipan (UK.2) dan Records Center Perangkat Daerah	Pelatihan	35	PKT	Teknis	22

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
37	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Level- 1 Kelas Fasilitas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
38	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Kelas Fasilitas Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
39	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Kelas Fasilitas Biro Umum Setda Prov. Kaltim	Pelatihan	30	PKT	Teknis	27
40	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Kelas Fasilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelatihan	30	PKT	Teknis	31
41	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Angkatan I	Pelatihan	30	PKT	Teknis	36
42	Pelatihan Manajemen Resiko Kelas Fasilitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
43	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Kelas Fasilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
44	Pelatihan Manajemen Risiko Kelas Fasilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
45	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Kelas Fasilitas Dinas Sosial Prov Kaltim	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
46	Pelatihan Juru Sita Pajak dan Penagihan Retribusi Kelas Fasilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
47	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Kelas Fasilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	31	PKT	Teknis	30
48	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support Kelas Fasilitas Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	25
49	Uji Kompetensi PBJ Level - 1 Bagi Alumni Angkatan 3	Ujian	30	PKT	Sertifikasi / Uji Kompetensi	23

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
50	Pelatihan Bahasa Isyarat Angkatan 3	Pelatihan	30	PKT	Teknis	27
51	Pelatihan Pelayanan Prima Angkatan 5	Pelatihan	30	PKT	Teknis	24
52	Pelatihan Pengelola Keuangan APBN Bagi Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	23
53	Pelatihan Public Speaking And Effective Communication Skill Kelas Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	32
54	Pelatihan Manajemen Energi Instansi Pemerintah	Pelatihan	40	PKT	Teknis	35
55	Pelatihan Public Speaking And Effective Communication Skill Kelas Fasilitasi Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kaltim	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
56	Pelatihan Manajemen Resiko Angkatan 3	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
57	Pelatihan Public Speaking And Effective Communication Skill Angkatan 3	Pelatihan	30	PKT	Teknis	33
58	Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Kelas Fasilitasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
59	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Kelas Fasilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	40	PKT	Teknis	34
60	Pelatihan Pelayanan Prima Angkatan 3	Pelatihan	35	PKT	Teknis	34
61	Pelatihan Pelayanan Prima Angkatan 4	Pelatihan	36	PKT	Teknis	36
62	Pelatihan Pengelola Keuangan APBN Bagi Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Pelatihan	30	PKT	Teknis	21
63	Pelatihan Kaji Cepat Bencana	Pelatihan	40	PKT	Teknis	40
64	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	24

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
65	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Level - 1 Pemerintah Kabupaten Paser	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
66	Pelatihan Manajemen Resiko Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	25
67	Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kelas Fasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Pelatihan	30	PKT	Teknis	29
68	Uji Kompetensi Alumni Angkatan 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Ujian	30	PKT	Sertifikasi / Uji Kompetensi	32
69	Uji Kompetensi Alumni Angkatan 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Ujian	30	PKT	Sertifikasi / Uji Kompetensi	23
70	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Angkatan II	Pelatihan	30	PKT	Teknis	27
71	Pelatihan Public Speaking And Effective Communication Skill Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	33
72	Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT Angkatan 2 Tahun 2025	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
73	Pelatihan Manajemen Risiko Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	29
74	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
75	Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelatihan	45	PKT	Teknis	44
76	Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT Angkatan 1	Pelatihan	34	PKT	Teknis	31
77	Pelatihan Kaji Cepat Bencana	Pelatihan	40	PKT	Teknis	40
78	Bantuan Hidup Dasar	Pelatihan	30	PKT	Teknis	19
79	Uji Kompetensi PBJ Level 1 Angkatan 4	Ujian	30	PKT	Sertifikasi / Uji Kompetensi	30
80	Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level - 1	Ujian	40	PKT	Teknis	37
81	Pelatihan Bahasa Isyarat Angkatan II	Pelatihan	30	PKT	Teknis	34
82	Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Angkatan 2 Tahun 2025	Pelatihan	30	PKT	Teknis	31
83	Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja Kelas Fasilitasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	35	PKT	Teknis	38

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
84	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 Angkatan 4	Pelatihan	30	PKT	Teknis	38
85	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
86	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level-1 Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKT	Teknis	37
87	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	27
88	Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill Angkatan I Tahun 2025	Pelatihan	30	PKT	Teknis	35
89	Pelatihan Konseling Dasar Bagi Tenaga Kesehatan	Pelatihan	40	PKT	Teknis	33
90	Pelatihan Bahasa Isyarat Angkatan I	Pelatihan	30	PKT	Teknis	31
91	Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	25
92	Pelatihan Penyusunan Anjab & ABK Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	32
93	Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	27
94	Pelatihan dan Uji Bendaharawan Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	31
95	Pelatihan Bendaharawan	Pelatihan	40	PKT	Teknis	40
96	Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level - 1 Angkatan 3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Sertifikasi / Uji Kompetensi	26
97	Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level - 1 Angkatan 2	Ujian	30	PKT	Sertifikasi / Uji Kompetensi	26
98	Pelatihan PPK Tipe C Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
99	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis	Pelatihan	30	PKT	Teknis	31
100	Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Angkatan I	Pelatihan	30	PKT	Teknis	24
101	Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Angkatan II	Pelatihan	30	PKT	Teknis	21

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
102	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level - 1 Angkatan 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
103	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Level 1 Angkatan 3	Ujian	30	PKT	Teknis	23
104	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
105	Pengelolaan Barang Milik Daerah Angkatan 1	Pelatihan	30	PKT	Teknis	29
106	Pelatihan Pelayanan Prima Angkatan 2	Pelatihan	30	PKT	Teknis	36
107	Pelatihan Pelayanan Prima Angkatan I	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
108	Uji Kompetensi Barang/Jasa Level 1 Kabupaten Kutai Kartanegara	Ujian	10	PKT	Teknis	2
109	Uji Kompetensi PBJ Level - 1 Angkatan 1	Ujian	25	PKT	Teknis	25
110	Pelatihan Bendaharawan Angkatan I	Pelatihan	30	PKT	Teknis	24
111	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level - 1 Angkatan 1 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKT	Teknis	26
112	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Level - 1 Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	30	PKT	Teknis	30
TOTAL						3602

2. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional menyelenggarakan program pengembangan kompetensi manajerial, seperti Pelatihan Kepemimpinan dan pelatihan penguatan kapasitas manajemen pemerintahan, serta pengembangan kompetensi fungsional yang ditujukan bagi pejabat fungsional sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. Berikut data pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, antara lain :

Tabel 3.11 Data Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Tahun 2025

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
1	Orientasi PPPK Angkatan 497	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	37
2	Orientasi PPPK Angkatan 498	Pelatihan	41	PKMF	Manajerial	35
3	Orientasi PPPK Angkatan 496	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
4	Orientasi PPPK Angkatan 494	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
5	Orientasi PPPK Angkatan 493	Pelatihan	43	PKMF	Manajerial	43
6	Orientasi PPPK Angkatan 495	Pelatihan	42	PKMF	Manajerial	42
7	Pelatihan Dasar Bagi Pengelola Trantibum dan Pranata Trantibum Satpol PP Angkatan I	Pelatihan	40	PKMF	Fungsional	40
8	Pelatihan Dasar Bagi Pengelola Trantibum dan Pranata Trantibum Satpol PP Angkatan II	Pelatihan	40	PKMF	Fungsional	40
9	Webinar "Belajar Keteladanan dari Buya Hamka"	Seminar	3000	PKMF	Sosiokultural	1445
10	Webinar "Wahai Pemimpin Selamatkanlah Dirimu dan Orang yang Engkau Pimpin"	Seminar	3000	PKMF	Sosiokultural	1676
11	Bimbingan Teknis Penyusunan Modul Ajar PJOK Berbasis Konsep Deep Learning bagi Guru SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Bimtek	40	PKMF	Fungsional	40
12	Orientasi PPPK Angkatan 431 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	38
13	Orientasi PPPK Angkatan 434 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
14	Orientasi PPPK Angkatan 432 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
15	Orientasi PPPK Angkatan 433 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	38
16	Bimbingan Teknis Penyusunan Policy Breif bagi Pemangku Jafung Analis Kebijakan, Jafung Perencana dan Jafung Periset di	Bimtek	40	PKMF	Fungsional	35

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
	Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Timur					
17	Bimtek Guru Pembimbing dan Konseling SMA/SMK/SLB 2025	Bimtek	150	PKMF	Fungsional	114
18	Bimbingan Teknis Public Speking bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menghadapi Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Timur	Bimtek	40	PKMF	Fungsional	46
19	Orientasi PPPK Angkatan 492 Kelas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
20	Orientasi PPPK Angkatan 491 Kelas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
21	Orientasi PPPK Angkatan 429 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
22	Orientasi PPPK Angkatan 430 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
23	Orientasi PPPK Angkatan 427 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	36
24	Orientasi PPPK Angkatan 428 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	37
25	Orientasi PPPK Angkatan 426 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	38
26	Webinar "Penyusunan Policy Brief, Kajian Ilmiah dan Naskah Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Isu Strategis".	Seminar	3000	PKMF	Sosiokultural	1991
27	Orientasi PPPK Angkatan 421 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
28	Orientasi PPPK Angkatan 423 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
29	Orientasi PPPK Angkatan 425 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
30	Orientasi PPPK Angkatan 422 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
31	Orientasi PPPK Angkatan 424 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
32	Orientasi PPPK Angkatan 419	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
33	Orientasi PPPK Angkatan 420	Pelatihan	42	PKMF	Manajerial	42
34	Orientasi PPPK Angkatan 302	Pelatihan	37	PKMF	Manajerial	37
35	Orientasi PPPK Angkatan 303	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
36	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) di Lingkungan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	30	PKMF	Fungsional	25
37	In - House Training Service Excellent bagi ASN, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan di Lingkungan BPSDM Provinsi Kaltim Angkatan II	Bimtek	50	PKMF	Fungsional	53
38	In - House Training Service Excellent bagi ASN, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan di Lingkungan BPSDM Provinsi Kaltim Angkatan I	Bimtek	80	PKMF	Fungsional	57
39	Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Angkatan VI	Bimtek	45	PKMF	Manajerial	45
40	Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Bontang Angkatan III	Bimtek	25	PKMF	Manajerial	21
41	Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Paser Angkatan IV	Bimtek	30	PKMF	Manajerial	24
42	Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Angkatan V	Bimtek	25	PKMF	Manajerial	24
43	Orientasi PPPK Angkatan 299	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	38
44	Orientasi PPPK Angkatan 300	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
45	Orientasi PPPK Angkatan 297	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
46	Orientasi PPPK Angkatan 298	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
47	Orientasi PPPK Angkatan 301	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
48	Orientasi PPPK Angkatan 292	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
49	Orientasi PPPK Angkatan 293	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
50	Orientasi PPPK Angkatan 296	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
51	Orientasi PPPK Angkatan 294	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	37
52	Orientasi PPPK Angkatan 295	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
53	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 114 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	29	PKMF	Manajerial	28
54	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan 115 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	28	PKMF	Manajerial	28
55	Pelatihan Pengendalian Pencemaran Air bagi Jafung Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Lingkungan Hidup, Penyuluh Lingkungan Hidup dan Pelaksana Terkait, di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kab/Kota Se Kalimantan Timur	Pelatihan	45	PKMF	Fungsional	44
56	PELATIHAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN (PEH) TINGKAT KEAHLIAN	Pelatihan	38	PKMF	Fungsional	41
57	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 111 Kelas Pemerintah Kota Samarinda	Pelatihan	32	PKMF	Manajerial	32
58	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 112 Kelas Pemerintah Kota Samarinda	Pelatihan	32	PKMF	Manajerial	32
59	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan 113 Kelas Pemerintah Kota Samarinda	Pelatihan	32	PKMF	Manajerial	32
60	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan 109 Kelas Pemerintah Kabupaten Paser	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
61	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 105 Kelas Pemerintah Kabupaten Paser	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
62	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan 110 Kelas Pemerintah Kabupaten Paser	Pelatihan	44	PKMF	Manajerial	44
63	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 107 Kelas Pemerintah Kabupaten Paser	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
64	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 106 Kelas Pemerintah Kabupaten Paser	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
65	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 108 Kelas Pemerintah Kabupaten Paser	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
66	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Rumah Sakit Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Kaltim	Bimtek	55	PKMF	Fungsional	58
67	Bimtek Public Speaking bagi Jafung Guru dan Tenaga Pendidik SMA/SMK Kota Samarinda	Bimtek	111	PKMF	Fungsional	127
68	Bimtek Penyusunan Tes Kompetensi Akademik Matematika Berbantuan AI dan Latek	Bimtek	43	PKMF	Fungsional	46
69	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 101 Kelas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	Pelatihan	34	PKMF	Manajerial	34
70	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 102 Kelas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	Pelatihan	34	PKMF	Manajerial	34
71	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 103 Kelas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	Pelatihan	33	PKMF	Manajerial	33
72	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan 104 Kelas Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	Pelatihan	38	PKMF	Manajerial	38

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
73	In House Training Implementasi Pembelajaran Mendalam Guru Kreatif, Murid Aktif, Membumikan Pembelajaran Mendalam di Era Digital	Bimtek	45	PKMF	Fungsional	41
74	Orientasi PPPK Angkatan 412 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
75	Orientasi PPPK Angkatan 417 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
76	Orientasi PPPK Angkatan 416 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
77	Orientasi PPPK Angkatan 411 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
78	Orientasi PPPK Angkatan 415 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
79	Orientasi PPPK Angkatan 413 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	44
80	Orientasi PPPK Angkatan 418 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	46	PKMF	Manajerial	46
81	Orientasi PPPK Angkatan 414 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
82	Bimbingan Teknis Public Speaking bagi Jafung Guru dan Tenaga Pendidik SMA/SMK/SLB Wilayah II (Kota Bontang) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	Bimtek	40	PKMF	Fungsional	39
83	Bimtek Deep Learning, AI dan Augmented Reality Dalam Pembelajaran Bagi Jafung Guru SMA/SMK/SLB Wilayah II (Kota Bontang) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	Bimtek	40	PKMF	Fungsional	38
84	Orientasi PPPK Angkatan 287	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
85	Orientasi PPPK Angkatan 290	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
86	Orientasi PPPK Angkatan 291	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
87	Orientasi PPPK Angkatan 289	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	38
88	Orientasi PPPK Angkatan 288	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
89	Orientasi PPPK Angkatan 404 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
90	Orientasi PPPK Angkatan 407 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	44	PKMF	Manajerial	44
91	Orientasi PPPK Angkatan 405 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
92	Orientasi PPPK Angkatan 403 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
93	Orientasi PPPK Angkatan 410 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
94	Orientasi PPPK Angkatan 408 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	44	PKMF	Manajerial	44
95	Orientasi PPPK Angkatan 409 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
96	Orientasi PPPK Angkatan 406 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
97	Fasilitasi Konsultasi Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025	Seminar	100	PKMF	Fungsional	32
98	Orientasi PPPK Angkatan 286	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
99	Orientasi PPPK Angkatan 285	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
100	Orientasi PPPK Angkatan 282	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
101	Orientasi PPPK Angkatan 284	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
102	Orientasi PPPK Angkatan 283	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
103	Pendalaman Tugas Anggota DPRD Angkatan I	Bimtek	45	PKMF	Manajerial	41

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
104	Penguatan Leadership Arsip	Bimtek	250	PKMF	Fungsional	226
105	Orientasi PPPK Angkatan 395 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
106	Orientasi PPPK Angkatan 399 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
107	Orientasi PPPK Angkatan 401 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
108	Orientasi PPPK Angkatan 402 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
109	Orientasi PPPK Angkatan 396 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
110	Orientasi PPPK Angkatan 397 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
111	Orientasi PPPK Angkatan 398 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
112	Orientasi PPPK Angkatan 400 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
113	Pendalaman Tugas Anggota DPRD Angkatan II	Bimtek	30	PKMF	Manajerial	16
114	Pelatihan Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelatihan	40	PKMF	Fungsional	40
115	Bimtek Deep Learning dan Digital Marketing dalam Pembelajaran Vokasi Bagi Jafung Guru SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	Bimtek	40	PKMF	Fungsional	41
116	Bimbingan Teknis Public Speaking bagi Jafung Guru dan Tenaga Pendidik SMU/SMK/SLB Wilayah I Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim	Bimtek	80	PKMF	Fungsional	61

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
117	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 28	Pelatihan	30	PKMF	Manajerial	30
118	Orientasi PPPK Angkatan 369 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
119	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran bagi Jabatan Fungsional Perencana	Pelatihan	80	PKMF	Fungsional	79
120	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Keuangan bagi Jafung Arsiparis Angkatan III	Bimtek	60	PKMF	Fungsional	46
121	Pengembangan Kompetensi Camat dan Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	Bimtek	40	PKMF	Manajerial	30
122	Orientasi PPPK Angkatan 361 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	41	PKMF	Manajerial	40
123	Orientasi PPPK Angkatan 357 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	42	PKMF	Manajerial	40
124	Orientasi PPPK Angkatan 363 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	41	PKMF	Manajerial	41
125	Orientasi PPPK Angkatan 359 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	42	PKMF	Manajerial	41
126	Orientasi PPPK Angkatan 358 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	42	PKMF	Manajerial	41
127	Orientasi PPPK Angkatan 362 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	41	PKMF	Manajerial	41
128	Orientasi PPPK Angkatan 360 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	42	PKMF	Manajerial	42
129	Bimbingan Teknis Public Speaking untuk Peningkatan Kemampuan Komunikasi Waka Bidang Kesiswaan dan Tenaga Pendidik SMU/SMK/SLB se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Bimtek	90	PKMF	Fungsional	86

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
130	Publik Speaking bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan ASN yang Berkompeten di Bidang Komunikasi	Bimtek	90	PKMF	Fungsional	93
131	Orientasi PPPK Angkatan 386 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
132	Orientasi PPPK Angkatan 385 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
133	Orientasi PPPK Angkatan 389 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
134	Orientasi PPPK Angkatan 388 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
135	Orientasi PPPK Angkatan 394 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	46	PKMF	Manajerial	44
136	Orientasi PPPK Angkatan 387 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
137	Orientasi PPPK Angkatan 392 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
138	Orientasi PPPK Angkatan 393 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	44
139	Orientasi PPPK Angkatan 390 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
140	Orientasi PPPK Angkatan 391 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
141	Orientasi PPPK Angkatan 355 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
142	Orientasi PPPK Angkatan 353 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
143	Orientasi PPPK Angkatan 348 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
144	Orientasi PPPK Angkatan 354 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	39
145	Orientasi PPPK Angkatan 349 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
146	Orientasi PPPK Angkatan 351 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
147	Orientasi PPPK Angkatan 347 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
148	Orientasi PPPK Angkatan 350 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
149	Orientasi PPPK Angkatan 352 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Seminar	40	PKMF	Manajerial	40
150	Orientasi PPPK Angkatan 356 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	41	PKMF	Manajerial	41
151	Orientasi PPPK Angkatan 375 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
152	Orientasi PPPK Angkatan 382 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
153	Orientasi PPPK Angkatan 383 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
154	Orientasi PPPK Angkatan 376 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
155	Orientasi PPPK Angkatan 379 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
156	Orientasi PPPK Angkatan 380 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
157	Orientasi PPPK Angkatan 378 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
158	Orientasi PPPK Angkatan 384 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
159	Orientasi PPPK Angkatan 381 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	44
160	Orientasi PPPK Angkatan 377 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	45	PKMF	Manajerial	45
161	Pelatihan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	40	PKMF	Fungsional	33
162	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan 98	Pelatihan	30	PKMF	Manajerial	30

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
163	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan 99	Pelatihan	29	PKMF	Manajerial	29
164	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan 100	Pelatihan	35	PKMF	Manajerial	35
165	Orientasi PPPK Angkatan 337 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
166	Orientasi PPPK Angkatan 338 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
167	Orientasi PPPK Angkatan 340 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
168	Orientasi PPPK Angkatan 345 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
169	Orientasi PPPK Angkatan 343 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
170	Orientasi PPPK Angkatan 346 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	41	PKMF	Manajerial	41
171	Orientasi PPPK Angkatan 344 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
172	Orientasi PPPK Angkatan 339 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
173	Orientasi PPPK Angkatan 341 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
174	Orientasi PPPK Angkatan 342 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
175	Orientasi PPPK Angkatan 367 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
176	Orientasi PPPK Angkatan 370 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
177	Orientasi PPPK Angkatan 374 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
178	Orientasi PPPK Angkatan 373 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
179	Orientasi PPPK Angkatan 365 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
180	Orientasi PPPK Angkatan 372 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
181	Orientasi PPPK Angkatan 368 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
182	Orientasi PPPK Angkatan 371 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
183	Orientasi PPPK Angkatan 366 Kelas Kota Samarinda	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
184	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 97	Pelatihan	30	PKMF	Manajerial	30
185	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 96	Pelatihan	30	PKMF	Manajerial	30
186	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 95	Pelatihan	30	PKMF	Manajerial	30
187	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 94	Pelatihan	30	PKMF	Manajerial	30
188	Orientasi PPPK Angkatan 336 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
189	Orientasi PPPK Angkatan 328 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
190	Orientasi PPPK Angkatan 329 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
191	Orientasi PPPK Angkatan 335 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
192	Orientasi PPPK Angkatan 332 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
193	Orientasi PPPK Angkatan 330 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
194	Orientasi PPPK Angkatan 334 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
195	Orientasi PPPK Angkatan 331 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
196	Orientasi PPPK Angkatan 333 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
197	Orientasi PPPK Angkatan 327 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
198	Manajemen ASN bagi Jafung SDM Aparatur	Bimtek	44	PKMF	Fungsional	44
199	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Keuangan bagi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Keuangan Angkatan II	Pelatihan	85	PKMF	Fungsional	80
200	Webinar "Transformasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN".	Seminar	3700	PKMF	Sosokultural	3539
201	Optimalisasi Peran Strategis Camat menuju Pemerintahan yang Inklusif	Pelatihan	50	PKMF	Manajerial	39
202	Orientasi PPPK Angkatan 318 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
203	Orientasi PPPK Angkatan 317 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
204	Orientasi PPPK Angkatan 322 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
205	Orientasi PPPK Angkatan 324 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
206	Orientasi PPPK Angkatan 323 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
207	Orientasi PPPK Angkatan 320 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
208	Orientasi PPPK Angkatan 321 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
209	Orientasi PPPK Angkatan 326 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
210	Orientasi PPPK Angkatan 325 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
211	Orientasi PPPK Angkatan 319 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
212	Webinar "Transformasi ASN PEMDA Melalui Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai".	Seminar	3500	PKMF	Sosiokultural	2742
213	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 92 Kelas Kabupaten Berau	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
214	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 91 Kelas Kabupaten Berau	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
215	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 93 Kelas Kabupaten Berau	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
216	Pelatihan Teknis Investigasi dan Keselamatan Kerja	Pelatihan	40	PKMF	Fungsional	36
217	Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Keuangan bagi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pengelola Keuangan	Bimtek	78	PKMF	Fungsional	84
218	Orientasi PPPK Angkatan 313 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
219	Orientasi PPPK Angkatan 308 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
220	Orientasi PPPK Angkatan 311 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
221	Orientasi PPPK Angkatan 307 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
222	Orientasi PPPK Angkatan 314 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
223	Orientasi PPPK Angkatan 309 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
224	Orientasi PPPK Angkatan 312 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
225	Orientasi PPPK Angkatan 316 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
226	Orientasi PPPK Angkatan 315 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
227	Orientasi PPPK Angkatan 310 Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
228	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 24 Kelas Kabupaten Kukar	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	41
229	Pelatihan Kepemimpinan bagi Kepala Sekolah SMP dan TK/PAUD Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Fungsional	41
230	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 23	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
231	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 12	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
232	Orientasi PPPK Angkatan 306 Kelas Kabupaten Mahakam Ulu	Pelatihan	33	PKMF	Manajerial	32
233	Orientasi PPPK Angkatan 305 Kelas Kabupaten Mahakam Ulu	Pelatihan	33	PKMF	Manajerial	32
234	Orientasi PPPK Angkatan 304 Kelas Kabupaten Mahakam Ulu	Pelatihan	34	PKMF	Manajerial	32
235	Pengembangan Kompetensi Lurah Angkatan 3	Bimtek	50	PKMF	Manajerial	33
236	Pelatihan Data Kualitatif dan Kuantitatif untuk Riset dan Kebijakan	Pelatihan	40	PKMF	Fungsional	34

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
237	Pelatihan Soft Skills bagi Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	43	PKMF	Fungsional	42
238	Orientasi PPPK Angkatan 281	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
239	Pengembangan Kompetensi Lurah Angkatan 2	Bimtek	70	PKMF	Manajerial	78
240	Orientasi PPPK Angkatan 279	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
241	Orientasi PPPK Angkatan 280	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
242	Orientasi PPPK Angkatan 278	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
243	Orientasi PPPK Angkatan 277	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
244	Pengembangan Kompetensi Lurah Angkatan 1	Bimtek	60	PKMF	Manajerial	40
245	Orientasi PPPK Angkatan 275 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
246	Orientasi PPPK Angkatan 273 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
247	Orientasi PPPK Angkatan 276 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
248	Orientasi PPPK Angkatan 272 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
249	Orientasi PPPK Angkatan 274 Kelas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
250	Orientasi PPPK Angkatan 271	Pelatihan	31	PKMF	Manajerial	31
251	Orientasi PPPK Angkatan 270	Pelatihan	32	PKMF	Manajerial	32
252	Orientasi PPPK Angkatan 267	Pelatihan	37	PKMF	Manajerial	37
253	Orientasi PPPK Angkatan 268	Pelatihan	32	PKMF	Manajerial	32
254	Orientasi PPPK Angkatan 269	Pelatihan	33	PKMF	Manajerial	33
255	Orientasi PPPK Angkatan 264 Kelas Pemerintah Kota Bontang	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
256	Orientasi PPPK Angkatan 263 Kelas Pemerintah Kota Bontang	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	41

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
257	Orientasi PPPK Angkatan 265 Kelas Pemerintah Kota Bontang	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
258	Orientasi PPPK Angkatan 266 Kelas Pemerintah Kota Bontang	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
259	Webinar "Kepemimpinan yang Mengayomi: Meneladani Sifat Rasulullah di Bulan Ramadhan".	Seminar	3000	PKMF	Sosiokultural	2147
260	Webinar Komunikasi Empatik dalam Kepemimpinan: "Membangun Hubungan Kuat dengan Pegawai dan Masyarakat"	Seminar	3000	PKMF	Sosiokultural	3319
261	Webinar "Ramadhan sebagai Momentum Transformasi Diri sebagai ASN Unggul"	Seminar	2200	PKMF	Sosiokultural	2739
262	Orientasi PPPK Angkatan 261	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
263	Orientasi PPPK Angkatan 260	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
264	Orientasi PPPK Angkatan 258	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
265	Orientasi PPPK Angkatan 262	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
266	Orientasi PPPK Angkatan 259	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
267	Peningkatan Kapasitas bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Bimtek	40	PKMF	Fungsional	44
268	Orientasi PPPK Angkatan 255	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
269	Orientasi PPPK Angkatan 253	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
270	Orientasi PPPK Angkatan 254	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
271	Orientasi PPPK Angkatan 256	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
272	Orientasi PPPK Angkatan 257	Pelatihan	38	PKMF	Manajerial	38
273	Diklat Teknis Penegakan Perda bagi Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Timur	Pelatihan	80	PKMF	Fungsional	83
274	Pelatihan Teknis Advokasi Kebijakan bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pelatihan	42	PKMF	Fungsional	42
275	Orientasi PPPK Angkatan 248	Pelatihan	38	PKMF	Manajerial	40

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
276	Orientasi PPPK Angkatan 252	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
277	Orientasi PPPK Angkatan 250	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
278	Orientasi PPPK Angkatan 249	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
279	Orientasi PPPK Angkatan 251	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
280	Orientasi PPPK Angkatan 243	Pelatihan	38	PKMF	Manajerial	39
281	Orientasi PPPK Angkatan 246	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	38
282	Orientasi PPPK Angkatan 244	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
283	Orientasi PPPK Angkatan 247	Pelatihan	38	PKMF	Manajerial	38
284	Orientasi PPPK Angkatan 245	Pelatihan	38	PKMF	Manajerial	38
285	Orientasi PPPK Angkatan 240	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
286	Orientasi PPPK Angkatan 239	Pelatihan	38	PKMF	Manajerial	40
287	Orientasi PPPK Angkatan 238	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
288	Orientasi PPPK Angkatan 241	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
289	Orientasi PPPK Angkatan 242	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
290	Webinar "5 Karakter Inovator Untuk ASN Galau"	Seminar	1500	PKMF	Sosiokultural	1809
291	Orientasi PPPK Angkatan 233	Pelatihan	38	PKMF	Manajerial	43
292	Orientasi PPPK Angkatan 236	Pelatihan	39	PKMF	Manajerial	39
293	Orientasi PPPK Angkatan 235	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
294	Orientasi PPPK Angkatan 237	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	40
295	Orientasi PPPK Angkatan 234	Pelatihan	40	PKMF	Manajerial	42
TOTAL						33.379

3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi ASN, fasilitasi penerbitan sertifikat/STTP, serta koordinasi dengan lembaga sertifikasi dan asesor kompetensi. Selain itu, bidang ini melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan pelatihan, meliputi akreditasi dan penjaminan mutu lembaga, penyusunan standar dan pedoman pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan, serta penguatan tata kelola

kelembagaan guna memastikan pelaksanaan pengembangan kompetensi berjalan sesuai standar, efektif, dan akuntabel.

a) Sertifikasi/ Uji Kompetensi Tahun 2025

Berikut data sertifikasi/ uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan yaitu :

Tabel 3.12 Data Sertifikasi/ Uji Kompetensi Tahun 2025

No.	Nama	Tipe	Kuota	Bidang	Jenis	Jumlah Peserta
1	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur	Ujian	20	skpk	Sertifikasi / Uji Kompetensi	15
2	Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Ujian	9	skpk	Sertifikasi / Uji Kompetensi	9
3	Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Ujian	55	skpk	Sertifikasi / Uji Kompetensi	50
4	Uji Kompetensi Pemerintahan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Ujian	46	skpk	Sertifikasi / Uji Kompetensi	34
TOTAL						108

b) Kerja Sama Antar Lembaga

Pembahasan Kerja Sama perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar hukum dalam pengembangan pelatihan yang fleksibel dan efektif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun status masa berlaku kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 3.13 Status Kesepakatan Bersama

No	Nota Kesepakatan / Kesepakatan Bersama Dengan	Tanggal TTD	Masa Aktif	Keterangan
1	Pemerintah Kota Samarinda	20 Agustus 2021	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
2	Pemerintah Kota Balikpapan	20 Agustus 2021	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
3	Pemerintah Kota Bontang	09 Juni 2021	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
4	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	26 Maret 2021	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
5	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	22 Juni 2021	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
6	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	20 Juli 2022	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
7	Pemerintah Kabupaten Paser	28 April 2021	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
8	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	27 Mei 2021	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
9	Pemerintah Kabupaten Berau	09 Agustus 2021	5 Tahun	Belum Ada Addendum / Revisi NK / Kesber, PKS Telah Terbit dan di Tanda Tangani
10	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	27 Desember 2019	5 Tahun	Proses perpanjangan Kesber
11	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	29 April 2024	5 Tahun	Rencana Kerja Telah Tersusun untuk Tahun 2024 dan tahun 2025

Berdasarkan kesepakatan bersama, maka pembahasan perjanjian kerjasama dilakukan terhadap 10 Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga melakukan kontrak kerja sama dengan :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dalam hal Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Pusat Pembinaan, Pendidikan Dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Perencana
3. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Arsip Nasional Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis.
4. SCB International Consulting dalam hal Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. PT Arga Bangun Bangsa dalam hal Pmetaan Talenta menggunakan TalenyDNA dan Pemanfaatan Artificial Itelligence.
6. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan dalam hal Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Tingkat Keahlian.
7. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam hal Pengembangan Kompetensi, Pendidikan,Pelatihan, Dan Kemitraan Strategis

Adapun status masa berlaku Perjanjian Kerja Sama BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Perjanjian Kerja Sama di Tahun 2025

No	Perjanjian Kerja Sama Dengan	Tanggal TTD	Masa Aktif	Keterangan
1	Pemerintah Kota Balikpapan	11 Januari 2024	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
2	Pemerintah Kota Samarinda	8 September 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
3	Pemerintah Kota Bontang	13 Juni 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
4	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	08 April 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
5	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	30 Juni 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum

No	Perjanjian Kerja Sama Dengan	Tanggal TTD	Masa Aktif	Keterangan
6	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	07 Maret 2025	31 Desember 2025	PKS sudah ada perubahan / addendum
7	Pemerintah Kabupaten Paser	05 Mei 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
8	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	03 Juni 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
9	Pemerintah Kabupaten Berau	15 Agustus 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
10	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	02 Juni 2023	24 Bulan	PKS menunggu perpanjangan Kesepakatan Bersama
11	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan	09 Juni 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
12	Pusat Pembinaan, Pendidikan Dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	01 Mei 2024	2 Tahun	PKS sudah ada perubahan / addendum
13	SCB International Consulting	03 Februari 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
14	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Arsip Nasional Republik Indonesia	15 April 2025	31 Mei 2025	PKS belum ada perubahan / addendum
15	PT. Arga Bangun Bangsa	15 April 2025	31 Maret 2026	PKS belum ada perubahan / addendum
16	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	08 Mei 2025	2 Tahun	PKS belum ada perubahan / addendum
17	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan	28 Agustus 2025	31 Desember 2025	PKS belum ada perubahan / addendum

c) Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)

AKPK adalah singkatan dari Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, yaitu sebuah proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui dan menggambarkan kebutuhan peningkatan kompetensi, baik secara kelembagaan maupun perorangan, khususnya bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. BPSDM Provinsi

Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan AKPK secara terstruktur melalui tiga tahapan, antara lain:

- a. Tahap pertama dilakukan melalui sosialisasi kepada pengelola kepegawaian perangkat daerah, yang bertujuan memberikan pemahaman teknis mengenai konsep, mekanisme, dan tata cara penyusunan AKPK berbasis kebutuhan jabatan dan arah kebijakan organisasi. Dalam kegiatan ini, pengelola kepegawaian dibekali pemahaman mengenai pentingnya AKPK sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi yang sistematis dan berbasis data, sehingga mampu mengoordinasikan proses identifikasi kebutuhan kompetensi di unit kerjanya secara efektif dan akuntabel.
- b. Tahap kedua berupa sosialisasi kepada seluruh ASN pada masing-masing perangkat daerah, yang bertujuan meningkatkan pemahaman ASN mengenai pentingnya pengembangan kompetensi sebagai bagian dari pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme. ASN diberikan penjelasan terkait cara mengidentifikasi kebutuhan kompetensi sesuai tugas jabatan, standar kompetensi jabatan, serta hasil penilaian kinerja, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan pengembangan kompetensi.
- c. Tahap ketiga adalah pendampingan penyusunan AKPK secara individu maupun organisasi. Pada tahap ini, BPSDM memberikan asistensi teknis kepada perangkat daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengembangan kompetensi yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kesenjangan kompetensi yang ada dan mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi. Pendampingan individu juga dilakukan agar rencana pengembangan kompetensi ASN selaras dengan kebutuhan jabatan dan rencana pengembangan karier.

Melalui pelaksanaan tiga tahapan tersebut, AKPK tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai tindak lanjut atas hasil pelaksanaan Sasaran Strategis I, yaitu “Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional, dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur” dengan indikator kinerja “Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi/STTP Pengembangan Kompetensi”, terdapat beberapa faktor pendorong, faktor penghambat, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

a) Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

Pengembangan kompetensi ASN merupakan kewajiban yang melekat pada setiap ASN dan instansi pemerintah. Kebijakan ini menjadi pendorong utama peningkatan profesionalisme ASN, termasuk pada dimensi kompetensi. Dasar hukum :

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, yang menekankan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja, yang menegaskan bahwa Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- 4) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menekankan bahwa Setiap PNS memiliki hak dan

kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan.

- 5) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

- b) Peningkatan Partisipasi ASN dalam Pengembangan Kompetensi termasuk Optimalisasi Metode Pembelajaran Klasikal nmeupun Nonklasikal.

Keberadaan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi, antara lain melalui penyelenggaraan webinar, sharing session, serta penyebarluasan informasi pelatihan melalui media sosial resmi dan WhatsApp grup. Kegiatan webinar dilaksanakan sebagai bentuk pembelajaran nonklasikal yang memungkinkan ASN mengikuti pengembangan kompetensi secara fleksibel tanpa terbatas oleh lokasi dan waktu, sehingga mampu menjangkau peserta dalam jumlah yang lebih luas. Selain itu, sharing session diselenggarakan sebagai forum berbagi praktik baik, pengalaman, dan peningkatan wawasan antar ASN, yang mendorong budaya belajar berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- c) Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)

Tujuan utama dari Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi adalah :

- 1) Mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki ASN saat ini dengan yang dibutuhkan, sehingga langkah pengembangan SDM bisa dilakukan secara tepat dan terarah.

- 2) Menyusun data dan informasi mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi masing-masing unit kerja dan individu ASN sebagai dasar perencanaan yang akurat.
- 3) Menjadi pijakan dalam merancang program peningkatan kapasitas ASN seperti pelatihan, workshop, seminar, atau bentuk pengembangan lainnya.

2. Faktor Penghambat

a) Keterbatasan kesesuaian jenis pelatihan dengan kebutuhan jabatan

Program pengembangan kompetensi yang tersedia belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil jabatan dan unit kerja. Akibatnya, sebagian pelatihan yang diikuti ASN belum menghasilkan sertifikasi atau STTP yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan profesionalisme ASN masih terbatas.

b) Rendahnya Partisipasi dalam Evaluasi Pascapelatihan

Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN telah dilaksanakan dengan menekankan keterkaitan terhadap peningkatan kinerja ASN, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pengukuran dampak pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja, kepemilikan sertifikasi dan/atau STTP, serta konsistensinya antar unit kerja masih perlu diperkuat agar hasil pengembangan kompetensi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Selain itu, dalam pelaksanaan evaluasi pascapelatihan masih terdapat peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti proses evaluasi secara lengkap, sehingga BPSDM Prov. Kaltim sebagai penyelenggara pelatihan belum memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pelatihan yang telah diikuti memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja peserta pelatihan.

3. Upaya Perbaikan Yang Telah Dilakukan

- a) Penguatan perencanaan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan

BPSDM Prov. Kaltim akan mengoptimalkan pemanfaatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) sebagai dasar penyusunan program pengembangan kompetensi, sehingga jenis dan sasaran pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan jabatan dan mendorong peningkatan kepemilikan sertifikasi dan/atau STTP yang relevan.

- b) Peningkatan pemerataan partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi

Upaya peningkatan partisipasi ASN dilakukan melalui pengaturan prioritas peserta pelatihan secara lebih adil dan proporsional, termasuk pemanfaatan metode pembelajaran nonklasikal, agar lebih banyak ASN memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi atau STTP.

- c) Penguatan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN

Upaya perbaikan dilakukan dengan memperkuat monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN melalui indikator yang terukur dan terintegrasi dengan kinerja serta kepemilikan sertifikasi dan/atau STTP, agar dampaknya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

b. Sasaran Strategis II

Berikut analisis Sasaran Strategi II “Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan “Nilai Akuntabilitas Kinerja”.

Tabel 3.15 Tabel Target dan Realisasi Sasaran Strategis II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pengembangan Kompetensi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,5	87,04	147,56
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	73	70,25	96,23

Untuk mengukur Tingkat keberhasilan pada sasaran strategis II terdapat indikator kinerja antara lain :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan secara berkala . Berikut tabel Klasifikasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Mutu Pelayanan :

Tabel 3.16 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konvensional (NIK), Mutu Pelayanan dan Kinerja Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Komersial (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,523	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil Pengumpulan dan perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025, berikut tabel Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur :

Tabel 3.17 Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Semester I Tahun 2025

NO	Unsur Pelayanan	NRRPU	IPK	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,39	84,71	Baik
U2	Prosedur	3,45	86,33	Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,34	83,56	Baik
U4	Biaya/Tarif	3,77	94,26	Sangat Baik
U5	Produk Layanan	3,40	84,97	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,54	88,93	Sangat Baik
U7	Prilaku Pelaksana	3,55	88,84	Sangat Baik
U8	Sarana Prasarana	3,44	85,94	Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,81	95,32	Sangat Baik
U10	Transparansi Pelayanan yang diberikan	3,39	84,68	Baik
U11	Integritas Petugas Pelayanan (terkait Suap, Pungutan Liar, gratifikasi dsb)	3,34	83,54	Baik

Berdasarkan hasil Pengumpulan dan perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025, berikut tabel Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur :

Tabel 3.18 Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Semester II Tahun 2025

NO	Unsur Pelayanan	NRRPU	IPK	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,38	84,43	Baik
U2	Prosedur	3,52	87,94	Baik
U3	Waktu Pelayanan	3,33	83,33	Baik
U4	Biaya/Tarif	3,79	94,76	Sangat Baik
U5	Produk Layanan	3,37	84,37	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,50	87,54	Baik
U7	Prilaku Pelaksana	3,46	86,51	Baik
U8	Sarana Prasarana	3,37	84,13	Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,84	95,91	Sangat Baik
U10	Transparansi Pelayanan yang diberikan	3,37	84,37	Baik
U11	Integritas Petugas Pelayanan (terkait Suap, Pungutan Liar, gratifikasi dsb)	3,37	84,25	Baik

Pada Semester 1 Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,49 atau 87,32 dengan kriteria mutu pelayanan “Baik”. Untuk rekomendasi unsur pelayanan yang dapat ditingkatkan disarankan

yaitu Unsur Waktu Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan.

Pada Semester 2 Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,48 atau 87,04 dengan kriteria mutu pelayanan “Baik”. Untuk rekomendasi unsur pelayanan yang dapat ditingkatkan disarankan yaitu Unsur Waktu Pelayanan dan Sarana Prasarana.

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan per semester dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 apabila di ambil nilai rata-rata dari Semester 1 dan semester 2 tahun 2025 yaitu sebesar 3,48 atau 87,18 dengan kriteria mutu pelayanan “Baik”.

Sebagai tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan pada semester I dan semester II, Badan pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kemudian menyimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong terhadap hasil kepuasan pelayanan, antara lain :

1. Faktor Pendorong

- a) Komitmen pimpinan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur, khususnya dalam membangun birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut menjadi landasan dalam peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ASN BerAKHLAK, sebagai core values ASN yang mendorong penguatan integritas, profesionalisme, dan budaya pelayanan prima di lingkungan instansi pemerintah.
- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan publik, sehingga memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Faktor Penghambat

- a) Unsur waktu pelayanan, yang dalam beberapa kondisi belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan pengguna layanan.
- b) Unsur Sarana dan prasarana, baik dari sisi fasilitas fisik maupun perangkat pendukung lainnya, yang dapat memengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses pelayanan.
- c) Integritas petugas pelayanan, yang masih perlu terus diperkuat melalui pembinaan dan pengawasan, guna memastikan pelayanan diberikan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan publik.

3. Upaya Perbaikan Yang Telah Dilakukan

- a) Peningkatan efektivitas waktu pelayanan, melalui peninjauan dan penyederhanaan alur pelayanan serta pemanfaatan sistem layanan berbasis digital untuk mempercepat proses pelayanan.
- b) Penguatan sarana dan prasarana pelayanan, dengan melakukan pemeliharaan dan pembaruan fasilitas pendukung,
- c) Penguatan integritas dan profesionalisme petugas pelayanan, melalui pembinaan berkelanjutan, internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, peningkatan kompetensi pelayanan prima, serta pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.

Pada Tahun 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **86,05**. Berdasarkan hasil pengukuran hingga akhir tahun, realisasi yang dicapai sebesar **87,04**, atau melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai **100,62%**, dengan predikat “**Sangat Baik**”.

3.3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.19 Hasil Perbandingan Output dan Input dengan Standar Efisiensi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100%)	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 4-5
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	147,56	91,74	55,82
2	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,62	98,26	0,16
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	96,23		

Tabel 3.20 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program / Kegiatan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI	NILAI EFISIENSI	%	JUMLAH PROG/KEG YANG DIALOKASIKAN			TOTAL PROG/KEG			KET
					Prog.	Keg.	Sub/ Kegiatan	Prog.	Keg.	Sub/ Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	Rp44.364.570.000,-	Rp31.175.029.671,-	Rp13.189.540.329,-	70,27	2	11	50	2	11	50	APBD
2022	Rp39.400.071.604,-	Rp36.171.556.224,-	Rp3.228.515.380,-	91,81	2	11	37	2	11	37	APBD
2023	Rp59.538.387.080,-	Rp53.170.165.731,-	Rp6.368.221.349,-	89,30	2	11	36	2	11	36	APBD
2024	Rp63.040.712.315,-	Rp59.505.185.587,-	Rp3.535.526.728,-	94,39	2	11	34	2	11	34	APBD
2025	Rp70.298.180.785,-	Rp67.258.161.112,-	Rp3.040.019.673,-	95,68	2	11	34	2	11	34	APBD

3.3.1.5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 2 sasaran strategis yang harus dilaksanakan antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	88	129,85	147,56	Rp27.830.776.402,-	Rp25.531.278.692,-	91,74
2	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	87,04	100,62	Rp42.467.404.383,-	Rp41.726.882.420,-	98,26
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	73	70,25	96,23			
Total						Rp70.298.180.785,-	Rp67.258.161.112,-	95,68

b. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Adapun realisasi anggaran pada masing masing program dan sub kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/SUB KEGIATAN/URAIAN BELANJA	ANGGARAN			CAPAIAN (%)
		ALOKASI	REALISASI	SISA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.467.404.383	41.726.882.420	4.023.005.344	98,26
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	425.089.319	421.185.450	186.049.389	99,08
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	303.349.609	300.171.750	3.177.859	98,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.153.086	18.970.000	183.086	99,04
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.586.624	102.043.700	542.924	99,47
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.099.052.633	15.987.041.778	112.010.855	99,30
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.691.821.333	15.597.411.778	94.409.555	99,40
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	401.210.000	383.630.000	17.580.000	95,62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulan/Semesteran	6.021.300	6.000.000	21.300	99,65
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6.310.000	6.310.000	-	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.310.000	6.310.000	-	100,00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	28.136.250	28.103.500	32.750	99,88
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	28.136.250	28.103.500	32.750	99,88
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	554.960.043	528.768.015	26.192.028	95,28
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	326.813.454	309.788.015	17.025.439	94,79
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	228.146.589	218.980.000	9.166.589	95,98
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.680.894.628	4.506.373.190	174.521.438	96,27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	173.944.090	172.196.520	1.747.570	99,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.173.964	73.410.500	763.464	98,97
	Penyediaan Bahan/Material	1.236.669.270	1.126.313.345	110.355.925	91,08
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.901.449	100.679.311	5.222.138	95,07
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.821.773.555	2.768.996.046	52.777.509	98,13

NO	PROGRAM/SUB KEGIATAN/URAIAN BELANJA	ANGGARAN			CAPAIAN (%)
		ALOKASI	REALISASI	SISA	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Prangkat Daerah	30.394.500	30.375.000	19.500	99,94
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	238.037.800	234.402.468	3.635.332	98,47
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.663.002.129	6.420.315.908	242.686.221	96,36
	Pengadaan Kendaraan Dinas	-	-	-	
	Pengadaan Mebel	2.207.005.193	2.130.483.103	76.522.090	96,53
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.455.996.936	4.289.832.805	166.164.131	96,27
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.228.817.401	6.187.729.682	628.144.872	90,78
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.093.600	6.925.500	168.100	97,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.803.681.750	1.794.749.374	8.932.376	99,50
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.418.042.051	4.386.054.808	31.987.243	86,30
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.781.141.980	7.641.054.897	140.087.083	98,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan	56.800.000	56.444.766	355.234	99,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.821.500	158.128.520	2.692.980	98,33
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	650.370.400	637.989.971	12.380.429	98,10
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.720.000	40.419.540	300.460	99,26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.872.430.080	6.748.072.100	124.357.980	98,19
	Jumlah Sekretariat	42.467.404.383	41.726.882.420	4.023.005.344	98,26
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		27.830.776.402	25.531.278.692	2.299.497.710	91,74
10	Pengembangan Kompetensi Teknis	9.083.798.974	8.476.321.013	607.477.961	93,31
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	9.083.798.974	8.476.321.013	607.477.961	93,31

NO	PROGRAM/SUB KEGIATAN/URAIAN BELANJA	ANGGARAN			CAPAIAN (%)
		ALOKASI	REALISASI	SISA	
11	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
	Penyelenggaraan Pengembangan Komptensi Bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	12.990.702.055	12.263.098.274	727.603.781	94,40
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Komptensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional	91.303.800	53.672.000	37.631.800	58,78
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintah Dalam Negeri Provinsi	1.736.479.048	959.934.164	776.544.884	55,28
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	518.331.690	480.797.070	37.534.620	92,76
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	3.387.472.085	3.283.873.971	103.598.114	96,94
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	22.688.750	13.582.200	9.106.550	59,86
	Total Realisasi BPSDM	70.298.180.785	67.258.161.112	6.322.503.054	95,68

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja BPSDM Prov. Kaltim

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2025. Laporan kinerja ini meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang prioritas pada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan dan diwujudkan ke dalam Indikator Kinerja Utama BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Adapun hasil pengukuran pencapaian kinerja BPSDM Prov. Kaltim dapat dilihat dari tabel berikut :

3.23 Capaian Kinerja BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	88	129,85	147,56
2	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,5	87,04	100,62
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	73	70,25	96,23

3.24 Capaian Keuangan BPSDM Prov. Kaltim Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Alokasi	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase SDM/Aparatur yang telah memperoleh Sertifikasi / STTP Pengembangan Kompetensi	Rp27.830.776.402,-	Rp25.531.278.692,-	91,74
2	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp42.467.404.383,-	Rp41.726.882.420,-	98,26
		Nilai Akuntabilitas Kinerja			
TOTAL			Rp70.298.180.785,-	Rp67.258.161.112,-	95,68

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik. Sasaran Strategis I terealisasi sebesar 147,56%, melampaui target yang ditetapkan. Pada Sasaran Strategis II, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 100,62% dengan kategori “Sangat Baik”, sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja mencapai 96,23%.

Dari sisi keuangan, realisasi anggaran sebesar 95,68% menunjukkan tingkat serapan yang efektif dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, kinerja BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berjalan efektif dengan kategori sangat baik dan selaras antara capaian kinerja dan pemanfaatan anggaran, dengan tetap memerlukan penguatan pada aspek akuntabilitas dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja Dimasa Yang Akan Datang

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menetapkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan berbasis kebutuhan kompetensi, melalui pemutakhiran Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) secara berkala agar program pelatihan lebih tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja, khususnya dalam mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja ASN.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan, melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pemanfaatan metode pembelajaran digital/blended learning, serta peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga pengajar.

4. Penguatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi, melalui peningkatan pengendalian internal, evaluasi capaian kinerja secara berkala, dan penyelarasan program dengan indikator kinerja utama.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penyederhanaan proses layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK guna meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.

Strategi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kualitas layanan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja di masa yang akan datang.

**KEPALA BPSDM
PROV. KALTIM**



Dra. Nina Dewi., M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19660928 198609 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.M.M Rifaddin No. 88 Samarinda Seberang
Telp. 0541 – 7270207 Fax. 0541 – 7270208, Email : bpsdm@kalimprov.go.id/
bpsdm.kalimprov@gmail.com website : http://bpsdm.kalimprov.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. NINA DEWI, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Prof. Dr. Drs. AKMAL MALIK, M.Si**
Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2025

**PIHAK KEDUA,
PENJABAT GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**


Prof. Dr. Drs. AKMAL MALIK, M.Si

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**


Dra. NINA DEWI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Pemerintahan bagi SDM/Aparatur di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau STTP	Persen	88
2	Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pengembangan serta Penyelenggaraan Kompetensi SDM/Aparatur di Kalimantan Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja BPSDM Prov. Kaltim	Nilai	BB

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 45.749.887.764,-	APBD
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 24.328.293.021,-	APBD
	Jumlah	Rp. 70.078.180.785,-	

Samarinda, Januari 2025

PIHAK KEDUA, PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  <u>Prof. Dr. Drs. AKMAL MALIK, M.Si</u>	PIHAK PERTAMA, KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  <u>Dra. NINA DEWI, M.AP</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660928 198609 2 001
---	--



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.A.M.M. Rifaddin No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75132

Telp : 0541-7270201 Pos-el : bpsdm@kaltimprov.go.id /

bpsdm.kaltimprov@gmail.com Laman : <https://bpsdm.kaltimprov.go.id>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. ANNA MIDAWATY, S.Kom., M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. NINA DEWI, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Hj. Anna Midawaty, S.Kom., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19730521 199803 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG SEKRETARIAT BSPDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya Layanan Kesekretariatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	85
		Persentase Realisasi Anggaran	Persen	85
		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	Persen	85
		Persentase Capaian Retribusi Daerah	Persen	70
		Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	65
2.	Meningkatnya Layanan yang ditindaklanjuti	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	Persen	90
		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Persen	90
		Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	Persen	82
		Persentase Barang Milik Daerah yang digunakan dan Berfungsi dengan Baik	Persen	90

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 607.234.839,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 16.329.160.097,-	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 6.310.000,-	APBD
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 28.136.250,-	APBD
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 385.136.483,-	APBD
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 6.210.110.978,-	APBD
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 8.511.205.663,-	APBD
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.815.874.554,-	APBD
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 884.190.900,-	APBD
	Jumlah	Rp. 39.777.359.764,-	

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



Hj. Anna Midawaty, S.Kom., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19730521 199803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.A.M.M. Rifaddin No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75132

Telp : 0541-7270201 Pos-el : bpsdm@kaltimprov.go.id /

bpsdm.kaltimprov@gmail.com Laman : <https://bpsdm.kaltimprov.go.id>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRIYANA RACHMAWATY, S.Psi**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. NINA DEWI, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

PIHAK PERTAMA,
KABID. PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIK

Apriyana Rachmawaty, S.Psi
Pembina
NIP. 19770417 200112 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ASN yang telah memperoleh Sertifikasi/STTP	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	88

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 7.034.808.055,-	APBD
	Jumlah	Rp. 7.034.808.055,-	

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

PIHAK PERTAMA,
KABID. PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



Apriyana Rachmawaty, S.Psi
Pembina
NIP. 19770417 200112 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.A.M.M. Rifaddin No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75132

Telp : 0541-7270201 Pos-el : bpsdm@kalimprov.go.id /

bpsdm.kalimprov@gmail.com Laman : <https://bpsdm.kalimprov.go.id>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI DJAITUN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. NINA DEWI, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

PIHAK PERTAMA,
KABID. SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN

Siti Djaitun, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700331 199403 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ASN yang telah memperoleh Sertifikasi/STTP	Persentase SDM/Aparatur yang Bersertifikasi Kompetensi	Persen	87

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 4.647.948.564,-	APBD
	Jumlah	Rp. 4.647.948.564,-	

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR



Dra. Nina Dewi, M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660928 198609 2 001

PIHAK PERTAMA,
 KABID. SERTIFIKASI KOMPETENSI
 DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN



Siti Djaitun, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700331 199403 2 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.A.M.M. Rifaddin No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75132

Telp : 0541-7270201 Pos-el : bpsdm@kaltimprov.go.id /

bpsdm.kaltimprov@gmail.com Laman : <https://bpsdm.kaltimprov.go.id>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RINA KUSHARYANTI, S.STP., M.M**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dra. NINA DEWI, M.AP**
Jabatan : **KEPALA BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR


Dra. Nina Dewi, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660928 198609 2 001

PIHAK PERTAMA,
KABID. PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL DAN
FUNGSIONAL


Rina Kusharyanti, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 19810731 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL
BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ASN yang telah Memperoleh Sertifikasi/STTP	Persentase SDM/Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan Daerah, Manajerial dan Fungsional	Persen	87

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 12.645.536.402,-	APBD
	Jumlah	Rp. 12.645.536.402,-	

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
 KALIMANTAN TIMUR


Dra. Nina Dewi, M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660928 198609 2 001

PIHAK PERTAMA,
 KABID. PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI MANAJERIAL DAN
 FUNGSIONAL


Rina Kusharyanti, S.STP., M.M
 Pembina
 NIP. 19810731 200012 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.A.M.M. Rifaddin No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75132

Telp : 0541-7270201 Pos-el : bpsdm@kaltimprov.go.id /

bpsdm.kaltimprov@gmail.com Laman : <https://bpsdm.kaltimprov.go.id>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAMSUL QAMAR, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. ANNA MIDAWATY, S.Kom., M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM


Hj. Anna Midawaty, S.Kom., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19730521 199803 2 005


Samsul Qamar, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19691223 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG SEKRETARIAT BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
2.	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Paket	89
3.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20
4.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
5.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
6.	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6
7.	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3
9.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
10.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2
11.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3
12.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	110

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
13.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	35
14.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
15..	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
16.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1
17.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1
18.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23
19.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48
20.	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	45
21.	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	49

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 6.310.000,-	APBD
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 251.933.454,-	APBD
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 133.203.029,-	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 173.944.090,-	APBD
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 74.173.964,-	APBD
6.	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 985.484.554,-	APBD
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 33.737.520,-	APBD
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 4.656.240.550,-	APBD
9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 30.394.500,-	APBD
10.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 256.135.800,-	APBD
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.437.868.000,-	APBD
12.	Pengadaan Mebel	Rp. 3.079.812.242,-	APBD
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.993.525.421,-	APBD
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 7.093.600,-	APBD
15..	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.726.664.550,-	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 5.082.116.404,-	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 56.800.000,-	APBD

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 136.300.500,-	APBD
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 650.370.400,-	APBD
20.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 40.720.000,-	APBD
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 5.972.528.000,-	APBD
	Jumlah	Rp. 28.785.356.578,-	

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



Hj. Anna Midawaty, S.Kom., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19730521 199803 2 005

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM



Samsul Qamar, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19691223 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan H.A.M.M. Rifaddin No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur 75132

Telp : 0541-7270201 Pos-el : bpsdm@kaltimprov.go.id /

bpsdm.kaltimprov@gmail.com Laman : <https://bpsdm.kaltimprov.go.id>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALASIAH, S.E.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. ANNA MIDAWATY, S.Kom., M.M.**
Jabatan : **SEKRETARIS BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Hj. Anna Midawaty, S.Kom., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19730521 199803 2 005

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEUANGAN

Salasiah, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19741226 200212 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG SEKRETARIAT BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5
2.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
3.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2
4.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54
5.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
6.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4
7.	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 428.105.753,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 19.153.086,-	APBD
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 159.976.000,-	APBD
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 15.943.698.797,-	APBD
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 379.440.000,-	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 6.021.300,-	APBD
7.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 28.136.250,-	APBD
	Jumlah	Rp. 16.964.531.186,-	

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



Hj. Anna Midawaty, S.Kom., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19730521 199803 2 005

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEUANGAN



Salasiah, S.E

Penata Tingkat I

NIP. 19741226 200212 2 011